



MEDIA INFORMASI POLRI

NEWS

TRIBRATA

TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT



TRANSFORMASI, TERUS BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK



08 LAPORAN UTAMA

HARI BHAYANGKARA DALAM BINGKAI 'SETAPAK PERUBAHAN'

24 KASUS

MENGUAK JEJAK DAN GERAK KELOMPOK KHILAFATUL MUSLIMIN

64 BUNGA RAMPAI

RAKERNIS BAHARKAM POLRI EVALUASI PENANGANAN PANDEMI

78 VIRAL

JADI PENUMPANG DADAKAN, CARA POLISI BANTU PENGENDARA MOBIL

MEMBUKA RUANG TRANSPARANSI PUBLIK

TRIBRATAnews • Edisi VI 2022



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGUCAPKAN



Selamat Ulang Tahun
**KE-61 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
IR. H. JOKO WIDODO**

"Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan,
dan perlindungan dalam mewujudkan Indonesia Maju"



Pelindung
KAPOLRI, WAKAPOLRI

Penasehat
KADIVHUMAS POLRI

Ketua Pengarah
KARO PENMAS, KARO PID, KARO MULTIMEDIA

Staf Ahli
PARA KABAG DIVHUMAS POLRI

Pemimpin Redaksi
KOMBES POL. HENDRA ROCHMAWAN, S.I.K., M.H.

Staf Redaksi
AKBP Drs. SUWANDA, M.Si.
AKBP BRONTO BUDIYONO, S.I.K.
PENATA PIPIET RATRIE KURNIA YANTIE, S.Kom.
IPTU DITA PRIMA JUWITA, S.I.Kom.
IPDA NIFRINAS YULISTIN RIZKY., S.I.Kom
PENDA HARYATI, A.Md.
BRIPTU AMANDA
BRIPDA ALDI RASYID

ART DIRECTOR
AGUNG SUPRIYANTO WIDADI

Fotografer
BAG PRODDOK
DIVHUMAS POLRI

Penerbit
BAG PENSAT
DIVHUMAS POLRI

Kontributor
SATKER MABES/SATWIL POLDA

Percetakan
PT Buana Inti Sejahtera

Alamat Redaksi
Bag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri
Jalan Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7218141, 7218770
Faks. (021) 7260208, 7218141

Redaksi Majalah **Tribrata News** menerima
kiriman naskah atau tulisan tentang Kepolisian atau
ilmu pengetahuan umum maupun artikel lainnya.
E-mail: pensat.divhumas@gmail.com

Transformasi

Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, transformasi Polri Presisi berjalan sesuai rencana yang sudah digariskan. Jika dirunut kembali awal transformasi Polri Presisi bermula dari hasil perenungan akan tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri di zaman modern. Baik itu perkembangan media sosial, pelayanan publik maupun cita-cita Polri yang dicintai masyarakat.

Tahap dimulainya Program Polri Presisi kali pertama disampaikan oleh Kapolri saat menjalani *Fit and Proper Test* di hadapan Komisi III pada tanggal 20 Januari 2021. Pada kesempatan itu dipaparkan tentang 4 transformasi Polri, 16 program prioritas, 51 kegiatan, dan 177 aksi. Program Polri Presisi itu dimulai tepat setelah Kapolri dilantik 27 Januari 2021.

Selanjutnya, dalam Program 100 Hari Kapolri dibangunlah dasar pondasi struktural maupun kultural terhadap Program Polri Presisi bagi seluruh personel baik di seluruh Satker dan Satwil Polri agar target capain transformasi segera tercapai. Dalam program 100 hari Kapolri itu, institusi Polri dapat mengeksekusi target capain kinerja sesuai target yang diharapkan.

Pada tahap berikutnya yakni satu tahun Program Polri Presisi diketahui ternyata institusi Polri mampu menunjukkan beberapa capaian seperti ungkap kasus-kasus besar (narkoba, aset BLBI, pinjol, dsb) sekaligus membangun 86 aplikasi yang diintegrasikan menjadi satu data. Polri juga sukses mencapai hasil kinerja berupa 98,20%, transformasi organisasi 98,78%, 96,59 transformasi yanlik, dan 98,60% transformasi pengawasan.

Pada tahap selanjut sasaran dan target memasuki fase organisasi unggul 2021-2025 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Berdasarkan tahapan ini maka Polri ke depan Polri harus lebih terbuka mau menerima kritik sebagai bahan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas ke depan.

Capaian fundamental selama kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bisa dirangkum di antaranya adalah pembenahan internal dan pembenahan layanan publik.

Pembenahan internal yang dilakukan antara lain menerapkan pendekatan keteladanan kepada personel Polri, memastikan tak ada pungutan dalam proses rekrutmen Polri, pembentukan tim Presisi Polri untuk mencegah kejahatan jalanan hingga menampung eks penyidik KPK serta mengubah Direktorat Tindak Pidana Korupsi menjadi Kortas dan langsung di bawah perintah Kapolri.

Mengimplementasikan Body Worn Camera untuk mengawasi kinerja anggota Polri

Dalam aspek layanan publik transformasi menyangkut kepastian layanan masyarakat dilakukan secepat mungkin, penerapan e-tilang dan polisi lalu-lintas yang tidak melakukan tilang, memastikan penerapan Undang-undang ITE lebih selektif, polsek tak lagi melakukan penyidikan

**08** laporan **UTAMA****Hari Bhayangkara dalam Bingkai
'Setapak Perubahan'**

Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada lembaga Polri terus meningkat. Semboyan Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri diapresiasi sejumlah kalangan.

24 KASUS

- MENGUAK JEJAK DAN GERAK KELOMPOK KHILAFATUL MUSLIMIN



Kapoli Ajak Masyarakat Amankan Agenda Nasional dan Internasional

40 INOVASI

- ETL, TRANSFORMASI YANG BERBUAH PUNDI-PUNDI

64 BUNGA RAMPAI

- RAKERNIS BAHARKAM POLRI EVALUASI PENANGANAN PANDEMI

52 UNGGULAN

- AIPTU KOMARUDIN, MENGANGKAT CITRA UKIR SOLDER DARI SUBANG

78 VIRAL

- JADI PENUMPANG DADAKAN, CARA POLISI BANTU PENGENDARA MOBIL DI JEMBRAN CURUG



Foto Cover : istimewa



**KAPOLRI LEPAS
DISTRIBUSI BAKSOS
DI LAPANGAN BHAYANGKARA**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan puncak acara Hari Bakti Kesehatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76. Gelaran itu dilaksanakan di titik 0 kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kapolri menjelaskan kegiatan ini menggandeng seluruh elemen bangsa, mulai dari organisasi kepemudaan, mahasiswa dan serikat pekerja atau buruh. Hari Bakti Kesehatan ini juga digelar secara serentak di 34 Provinsi Indonesia.

"Berbagai macam jenis kegiatan mulai dari vaksinasi, yang kami targetkan di angka 1 juta dosis untuk booster. Kemudian pelayanan kesehatan untuk berbagai macam keluhan dari masyarakat kurang lebih ada 22.665 pasien. Kita juga melaksanakan kegiatan operasi celah bibir dan langit dengan capaian 918



pasien, donor darah 53.991 orang, operasi katarak 357," kata Kapolda, Jumat 17 Juni 2022. [*]

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan lomba menembak bersama TNI-Polri dan insan media di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu 11 Juni 2022.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-76 pada 1 Juli 2022.

"Baru saja kita melaksanakan kegiatan kejuaraan menembak. Di mana, di dalamnya yang ikut kegiatan lomba ini adalah rekan-rekan dari TNI, Polri, dan media, ada teman-teman Pimred, Wapimred, Korlip, wartawan dan Dewan Pers. Saya kira hari ini kegiatan yang cukup lengkap dan solid," kata Kapolda.

Sigit menegaskan, TNI-Polri serta insan pers merupakan mitra strategis dalam menghadapi segala bentuk situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia.

Di antaranya, dikatakan Sigit, media bersama TNI-Polri bersama-sama



berjuang melakukan penanganan Pandemi Covid-19 dan arus mudik Lebaran 2022 untuk masyarakat, dengan perannya masing-masing.



Kapalri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada 15 atlet anggota Polri berprestasi di SEA Games Vietnam 2021. Upacara pemberian penghargaan itu digelar di Gedung Rupattama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

"Bahwa hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa hadir dan tentunya hari ini kita secara khusus institusi Polri memberikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota kita yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama institusi dengan mengikuti kegiatan SEA

Games dan anggota-anggota kita ini," kata Kapalri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya di upacara penghargaan atlet anggota Polri, Senin 30 Mei 2022.

"Dari 18 anggota yang mengikuti SEA Games, 15 di antaranya berhasil mendapatkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu dan tentunya anggota-anggota kita ini telah berjasa," kata Kapalri.

Lebih lanjut Kapalri memberikan selamat atas peraih prestasi para atlet tersebut dan mengatakan prestasi itu mengharumkan institusi Polri dan negara.

"Dan dengan prestasinya mereka mampu mengibarkan bendera merah putih pada saat pelaksanaan SEA Games dan tentunya ini membawa nama harum institusi Polri. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada seluruh anggota yang telah berhasil meraih prestasi mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama institusi," kata Kapalri.



Kapalri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi mengukuhkan penguatan struktur Korps Brimob Polri dan berharap satuan pamungkas tersebut siap memberi pelayanan yang terbaik.

"Tentunya harapan dan keinginan kita untuk terus menambah kekuatan Brimob sebagai satuan pamungkas kita yang selalu kita turunkan dalam situasi-situasi yang sangat penting," kata Sigit di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat 10 Juni 2022.

Dalam kesempatan tersebut Kapalri juga menyinggung soal kesiapan Polri menghadapi pelaksanaan G20 di Indonesia, otonom baru (DOB) Papua dan pelaksanaan Pilpres hingga Pilkada 2024 yang diharapkan semuanya berjalan baik.

"Situasi-situasi yang sangat penting pada saat menghadapi ancaman-ancaman yang berintensitas dan bereskalasi tinggi," kata Kapalri.

Lebih lanjut ditegaskan hal itulah yang menjadi alasan Brimob harus diperkuat, karena diperlukan penambahan personel sekaligus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.[*]





TRANSFORMASI, TERUS BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK

Kesadaran untuk melakukan transformasi telah menjadi kebutuhan mutlak Korps Bhayangkara di tengah tantangan jaman dan perkembangan jaman yang main kompleks. Mereka yang tak berubah dan tak bisa beradaptasi akan segera menjadi kuno, antik, ketinggalan dan tentu saja ditinggalkan jaman.

Transformasi dan perubahan menjadi kepastian yang tak terbantahkan.

Hari Bhayangkara dalam Bingkai **“Setapak Perubahan”**



Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada lembaga Polri terus meningkat. Semboyan Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri diapresiasi sejumlah kalangan.

“To improve is to change; to be perfect is to change often,” jawab Winston Churchill ketika menuai kritik pertengahan abad lalu atas perubahan-perubahan yang dilakukan pada sistem perpolitikan Inggris.

Churchill benar saat itu dan menjadi lebih benar lagi di era sekarang saat perubahan menjadi keniscayaan di tengah jaman yang berderap cepat. Mereka yang tak berubah segera menjadi kuno, antik, ketinggalan dan tentu saja ditinggalkan jaman.

Kesadaran inilah yang benar-benar merasuk semangat institusi

• Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Transformasi dan perubahan menjadi
• kepastian yang tak terbantahkan.

• Tentu masih terpatri di ingatan
• publik ketika Kapolri Jenderal Listyo
• Sigit Prabowo meminjam peribahasa
• “Ikan busuk mulai dari kepala” untuk
• mengingatkan soal keteladanan.

• Hal itu dikatakan Kapolri saat
• menghadiri penutupan pendidikan
• Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen
• Polri Dikreg ke-61 dan Sespimma Polri
• Angkatan ke-66, di Lembang, Jawa
• Barat, pada 27 Oktober 2021 lalu.

• “Ada pepatah, ikan busuk mulai
• dari kepala, kalau pimpinannya

• bermasalah maka bawahannya akan
• bermasalah juga. Pimpinan harus jadi
• teladan, sehingga bawahannya akan
• meneladani. Karena kita tidak mungkin
• diikuti kalau kita tidak memulai yang
• baik, kita tidak mungkin menegur kalau
• tidak jadi teladan, harus mulai dari
• pemimpin atau diri sendiri,” kata Kapolri.

• “Ini yang saya harapkan rekan-
• rekan mampu memahami. Hal yang
• dijalankan penuh keikhlasan akan
• menjadi buah keikhlasan. Tolong ini
• diimplementasikan bukan hanya teori
• dan pepatah.”

• Artinya, segala permasalahan
• internal di kepolisian dapat terjadi





karena pimpinannya bermasalah atau tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ia memastikan para pejabat utama Mabes Polri memiliki komitmen untuk memberikan reward bagi personel yang menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerja keras untuk melayani serta mengayomi masyarakat.

Kapolri menekankan kepada nggotanya, apabila ada personel Polri yang tidak menjalankan tugasnya

dengan baik, atau melanggar aturan yang ada, dia menegaskan akan memberikan sanksi.

Bahkan Kapolri rak ragu untuk menindak tegas pimpinannya apabila tidak mampu menjadi contoh bagi jajarannya, apabila kedepannya masih melanggar aturan.

“Namun terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi maka jangan ragu melakukan tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk

kebaikan organisasi yang susah payah berjuang. Menjadi teladan, pelayan dan pahami setiap masalah dan suara masyarakat agar kita bisa ambil kebijakan yang sesuai,” kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Lebih lanjut, Kapolri menekankan kepada seluruh perwira lulusan tersebut untuk bisa menjadi pemimpin yang mengayomi dan melayani bagi warga dan anggotanya. Pesan Kapolri, “Jadilah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang bisa melayani dan menempatkan anggota dan masyarakat sebagai

prioritas. Jangan hanya memerintah, tapi tidak tahu kesulitan. Ini menjadi masalah.”

Pesan ini jelas ditujukan kepada anggotanya yang masih menaruh sikap arogan. Kapolri tak ingin memiliki anggota yang justru menjadi sumber masalah perpecahan internal di lembaga yang dipimpinnya.

Secara lugas, Kapolri berpesan kepada para petinggi Polri untuk

- memimpin anggotanya dengan tidak boleh mudah terpancing emosinya. Karena, hal itu dapat berpengaruh pada tindakan yang tidak diinginkan.

- Bagi Jenderal Listyo Sigit, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan. Ibarat kata, tidak hanya bertengger di puncak kepemimpinan.

- “Turun langsung ke lapangan agar tahu apa yang dirasakan masyarakat

- dan anak buah. Jaga emosi, jangan terpancing. Emosi mudah meledak akan mengakibatkan perbuatan yang tidak terukur. Apalagi diberikan kewenangan oleh undang undang maka tindakan tidak tersebut akan berpotensi menjadi masalah.”

- Pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi semua pihak agar semangat lahirnya konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi





Berkeadilan) bisa berdampak ke masyarakat dan internal kepolisian.

Dampak Perubahan

Genap setahun menjadi Kapolri. nampaknya beberapa perubahan perbaikan dirasakan oleh Korps Bhayangkara, "Alhamdulillah saya telah memulai setapak perubahan untuk mewujudkan Polri Presisi yang dituangkan dalam buku Setapak Perubahan: Catatan Pencapaian Satu Tahu Polri Presisi," kata Kapolri melalui kanal twitter @ListyoSigitP pada 28 Januari 2022 lalu.

Kapolri menyampaikan beberapa perubahan yang menjadi catatan

• pencapaian satu tahun Polri Presisi di masa kepemimpinannya yakni;

• Awal Transformasi Polri, yakni semangat transformasi itu berawal dari hasil perenungan akan tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri pada zaman modern, baik perkembangan media sosial, pelayanan publik maupun cita-cita Polri yang dicintai masyarakat.

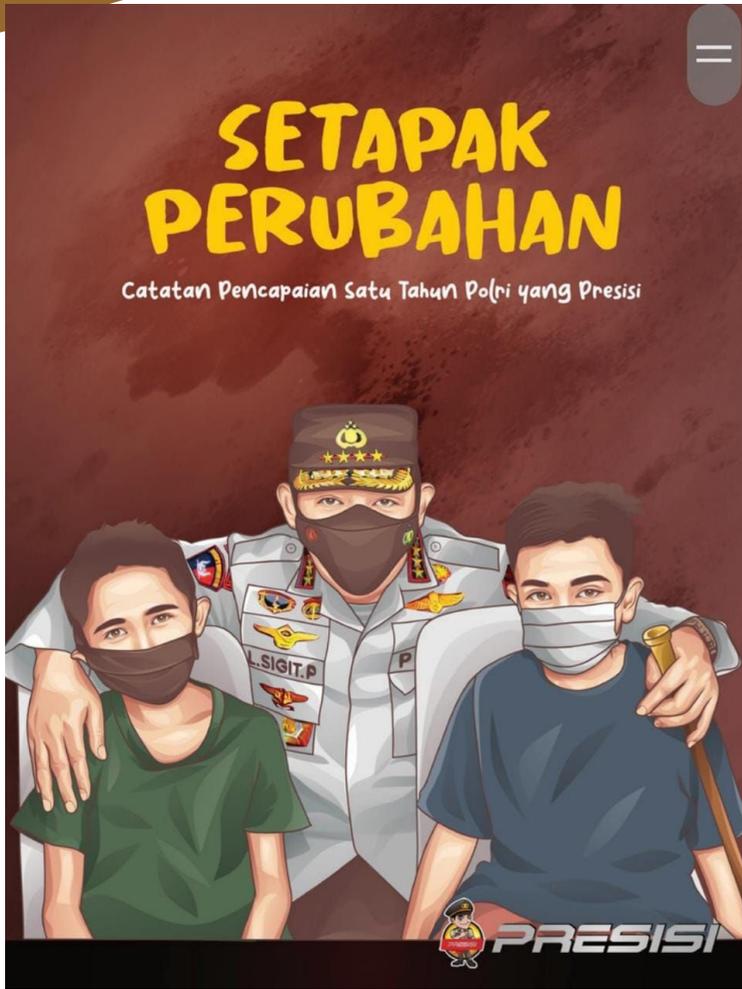
• Dimulainya Program Presisi, berupa konsepsi Presisi pertama disampaikan dalam Fit and Proper Test di hadapan Komisi III pada tanggal 20 Januari 2021, di mana saat itu dipaparkan tentang 4 transformasi Polri, 16 program prioritas, 51 kegiatan, dan 177 aksi serta dimulai program Presisi setelah Kapolri dilantik

• 27 Januari 2021.

• Program 100 Hari Kapolri, untuk membangun pondasi struktural maupun kultural terhadap program Presisi maka seluruh Satker dan Satwil Polri dilakukan target capain transformasi. Di mana dalam program 100 hari Kapolri, institusi Polri dapat mengeksekusi target capain kinerja sesuai target yang diharapkan.

• Satu Tahun Polri Presisi diketahui Polri telah mampu menunjukkan beberapa capaian manis seperti ungkap kasus-kasus besar (narkoba, aset BLBI, pinjol, dsb). Pembangunan 886 aplikasi yang akan diintegrasikan menjadi satu data. Polri juga telah mencapai hasil





kinerja sebanyak 98,20%, transformasi organisasi 98,78%, 96,59 transformasi yanlik, dan 98,60% transformasi pengawasan.

Whats Next, menjadi konteks fase organisasi unggul 2021-2025 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Polri maka ke depan Polri harus lebih terbuka mau menerima kritik sebagai bahan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas ke depan.

Berikut beberapa hal yang berhasil dirangkum dari masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pembenahan internal lembaga

1. Mengamalkan nilai peribahasa kepala ikan busuk, Kapolri mencopot 7 pejabat Polri.
2. Kapolri memastikan bahwa tidak ada biaya yang dipungut bagi mereka yang ingin masuk menjadi anggota Polri.

3. Kapolri membentuk tim Presisi Polri untuk mencegah kejahatan jalanan.
4. Menyelamatkan eks penyidik KPK, dengan menjadikan Novel Baswedan sebagai karyawan Polri dan memberikan tugas sesuai perannya di dunia tindak pidana korupsi.
5. Kapolri mengubah Direktorat Tindak Pidana Korupsi menjadi Kortas, bertugas langsung dibawah perintah Kapolri dan memperkuat pemberantasan korupsi.
6. Mengimplementasikan Body Worn Camera untuk mengawasi kinerja anggota Polri.

Pembenahan pelayanan publik

1. Kapolri memastikan pelayanan publik yang didapatkan

2. Polisi lalu lintas tidak melakukan tilang.
3. Kapolri menerapkan e-tilang untuk meminimalisir penyelewengan dan memudahkan anggota.
4. Kapolri memastikan penerapan Undang-undang ITE bisa lebih selektif.
5. Kepolisian sektor tidak lagi melakukan penyidikan.
6. Kapolri memastikan setiap kantor Polisi ramah bagi penyandang disabilitas.
7. Memastikan terselenggaranya restorative justice.
8. Mempermudah masyarakat yang ingin memperpanjang Surat Ijin Mengemudi dengan sistem online.
9. Membentuk virtual police untuk mengawasi operasional media sosial.

Setidaknya poin-poin besar ini yang paling bisa dirasakan dampaknya di era kepemimpinannya Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik kepada Polri melesat naik, bahkan mampu menggeser posisi lembaga anti-rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kinerja institusi Polri dinilai sangat memuaskan publik. Hasil survei juga menyebutkan setidaknya ada dua alasan mengapa tingkat kepercayaan dan kepuasan publik tinggi terhadap Polri.

Pertama, Polri dinilai berhasil dalam memberantas kejahatan narkoba. Angkanya sebanyak 66%. Publik merasa puas terhadap kinerja institusi kepolisian dalam hal menangkap dan memberantas tindak pidana kejahatan narkoba sehingga publik memberikan apresiasi terhadap Polri.

Kedua, institusi Polri juga dinilai berhasil dalam hal penangkapan pelaku teror atau terorisme. Hal itu terlihat dari banyaknya pelaku teror dan jaringannya yang berhasil diungkap dan dibongkar Densus 88 Antiteror Polri. Dua keberhasilan Polri itu sangat menonjol sehingga approval rating Polri naik dan meningkat 72%.

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap institusi Polri tentu tak lepas dari semangat dan komitmen serta kerja kolektif jajaran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.*]

Berbenah, Berbenah dan Terus Berbenah

Mudah bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk mengidentifikasi kekecewaan masyarakat kepada Polri karena aktif di media sosial hingga banyak mengetahui apa yang terjadi di kalangan masyarakat.



Berbenah, berbenah dan terus berbenah menjadi fokus kerja bagi Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 27 Januari 2021 yang lalu.

Ucapan terima kasih terus dilayangkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo di berbagai kesempatan terkait kritik yang diberikan masyarakat kepada lembaga yang dipimpinnya.

Bukan tanpa alasan, sangat mudah bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo

• untuk mengidentifikasi kekecewaan masyarakat kepada lembaga Polri.

• Mantan Kabareskrim ini juga cukup aktif di media sosial, sehingga ia banyak mengetahui apa yang terjadi di kalangan masyarakat.

• Ketika sudah resmi menjabat menjadi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung soal tanda pagar atau tagar yang trending di beberapa media sosial.

• Dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Itwasum Polri 17 Desember

• 2021 lalu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung tagar berisi kritik terhadap polisi seperti #1Hari1Oknum dan #PercumaLaporPolisi.

• Kapolri menyebut kritik itu saat membahas soal manajemen pengaduan masyarakat oleh polisi. Ia mengatakan bahwa seringkali muncul masalah baru di masyarakat ketika polisi tidak menanggapi dan menangani laporan masyarakat dengan baik.

• Kapolri menegaskan, “Kenapa ini saya sampaikan? Akhir-akhir ini

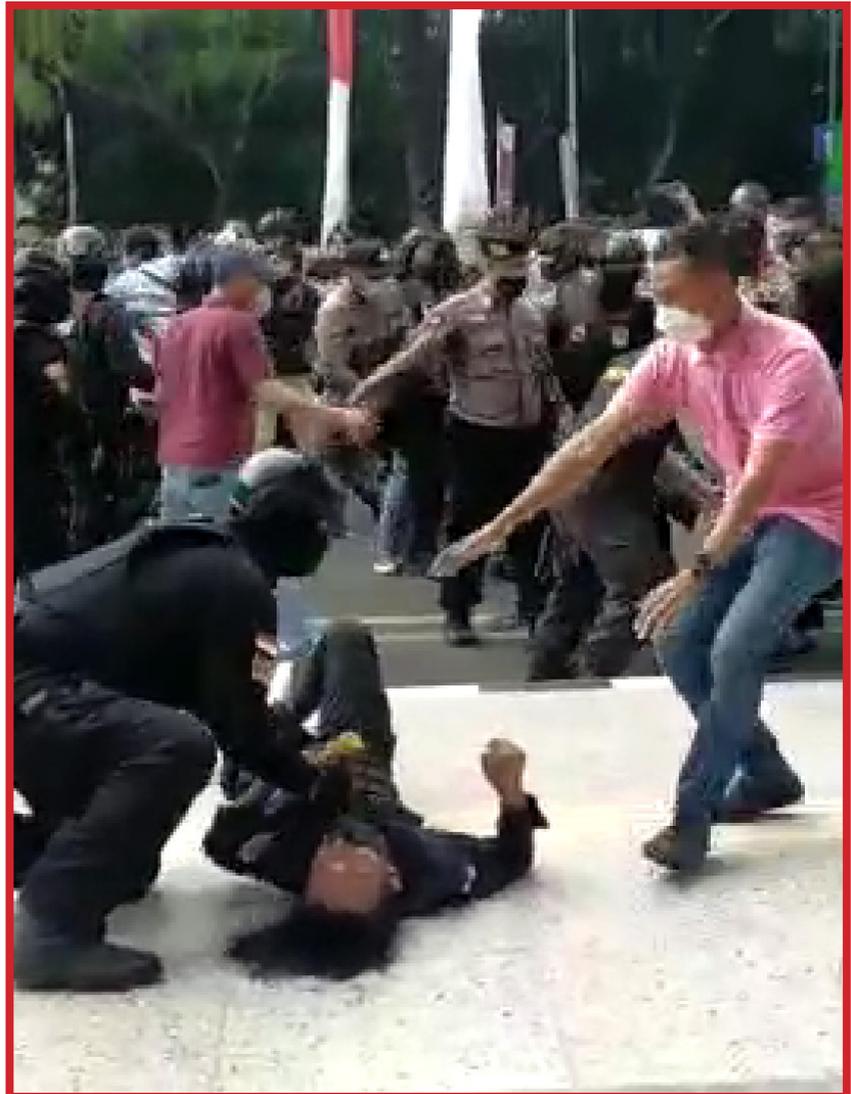


muncul banyak fenomena di media sosial yang harus kita cermati. Ini bagian dari tugas rekan-rekan semua untuk mengevaluasi. Beberapa waktu lalu muncul #PercumaLaporPolisi. Kemudian muncul lagi #1Hari1Oknum,” Kapolri menjelaskan hal tersebut sembari mengambil contoh kasus tentang kekerasan oleh polisi saat mengawal unjuk rasa, serta kasus penembakan oleh polisi.

Salah satu contoh kasus teranyar pada Oktober 2021 lalu, aparat kepolisian kembali menjadi sorotan setelah melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa di Tangerang. Dalam video yang beredar, terdapat aparat kepolisian yang menertibkan partisipan demo dengan membanting mahasiswa yang tengah melakukan aksi di Hari Ulang Tahun Tangerang pada 13 Oktober 2021 lalu. Kasus ini menambah catatan panjang daftar perbaikan yang harus dilakukan oleh Kapolri di dalam tubuh lembaga negara yang tengah dipimpinya. Tak menampik, isu ini menjadi perhatian Kapolri. Pasalnya, berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, pada tahun 2019 saja tercatat sebanyak 68 kasus tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada partisipan aksi. Sehingga hal ini harus segera dibenahi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyinggung seruan #NoViralNoJustice, yakni ketika keadilan dapat diraih oleh masyarakat apabila sebuah kasus atau masalah hukum terlebih dahulu viral di media sosial, “Masyarakat melihat bahwa kasus yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan lebih cepat. Bahkan yang terakhir muncul fenomena #viralforjustice. Jadi ini sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral, karena kalau tidak viral prosesnya tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Kapolri.

Kapolri mengajak segenap Itwasum untuk mengevaluasi kritik serta dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Seharusnya kritik-kritik yang keluar dari masyarakat dapat menjadi bahan berbenah yang selalu diingatkan oleh Kapolri, “Ini waktunya kita berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Ini juga menjadi bagian tugas jajaran untuk mengevaluasi, disisi mana yang masih menjadi kurang terkait



perjalanan organisasi kita, baik sevara manajemen atau perilaku individu sehingga kemudian bisa diperbaiki,”

Menurut mantan Kabareskrim itu, Polri bisa menjadi lebih baik apabila peran dari Itwasum dimaksimalkan di setiap lini sehingga seluruh kegiatan organisasi Polri berjalan di jalur yang benar sesuai tujuan organisasi. Personel Polri harus mampu keluar dari zona nyaman untuk mewujudkan harapan masyarakat sebagai Polri yang dicintai dan diharapkan masyarakat, “Pilihannya hanya satu, yakni harus keluar dari zona

nyaman sehingga organisasi kita bisa menjadi organisasi modern,” ungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penutup pertemuan tersebut.

Fenomena tagar #1Hari1Oknum ini memang terus berkumandang di media sosial, khususnya twitter. Apabila ditelusuri, banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang terjadi di sleuruh penjuru negeri terkait pelayanan Polri ataupun perilaku aparat kepolisian di tengah masyarakat sipil. Tentu tak semua, hanya oknum-oknum tak bertanggung jawab saja. Tapi tentu



saja perilaku-perilaku ini mencoreng nama baik lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

Salah satunya pada Desember 2021 lalu, publik dibuat geram dengan kasus bunuh diri seorang mahasiswa di pusara ayahnya di pemakaman umum Desa Japan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Faktanya, mahasiswa tersebut bunuh diri karena tekanan mental yang didapatkan setelah dipaksa melakukan aborsi sebanyak 2 kali oleh kekasihnya yang merupakan anggota Polri, Bripda Randy Bagus. Ia berdinasi di Polres

Pasuruan. Kasus ini viral di media sosial dan masyarakat menuntut agar Bripda Randy diberikan penanganan tegas dari Polri. Dari hasil penyidikan, Bripda Randy terbukti bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka.

Bripda Randy dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindakan tercela sebagai anggota Polri Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf B dan Pasal 11 huruf C peraturan Kapolri Tahun 2011. Kabih Humas Polda Jatim, Kombes Gatot Repli Handoko menyebut, "Bripda Randy Bagus dinyatakan bersalah dan direkomendasikan

PTDH," Polri menegaskan tak akan main-main dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Terhadap Bripda Randy, Polri melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Sesuai arahan Kapolri, proses hukum pidana kasus dugaan aborsi yang menjerat Bripda Randy tetap terus berjalan.

Terlepas dari berbagai kasus yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, Mabes Polri memberikan tanggapan positif terkait kritikan yang dikeluarkan masyarakat. Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyebut



APORAN UTAMA

semua saran, masukan dan kritik dari masyarakat merupakan bagian dari evaluasi yang akan terus dilakukan oleh Polri. Ia menambahkan, arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada para Polri sudah jelas, yakni tidak boleh ragu apabila akan memberikan tindakan tegas kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

"Yang jelas, pemimpin dari Polri sesuai dengan arahan Bapak Kapolri saat apel Kasatwil, untuk pimpinan Polri di wilayah tidak boleh ragu-ragu melakukan tindakan tegas kepada anggota yang terbukti bersalah dan juga harus seimbang," ujar Irjen Dedi di

Mabes Polri pada 6 Desember 2021 lalu.

Berdasarkan perintah Kapolri, seluruh pimpinan Polri di wilayah diminta tegas dan berimbang, apabila ada anggota yang melanggar supaya diberi hukuman. Tapi tentu saja, pimpinan Polri juga harus berimbang antara hukuman yang diberikan kepada yang bersalah, dan memberikan apresiasi kepada yang berprestasi.

Keseriusan pembenahan lain juga ditunjukkan oleh Kapolri adalah akan melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Sidang Etik AKBP Raen Brotoseno. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berjanji akan

melakukan PK, tapi ia harus terlebih dahulu memperbaiki payung hukum yang mengatur PK terhadap hasil sidang etik yang dirasa tidak benar. Langkah ini akan diambil setelah peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 diundangkan.

AKBP Raden Brotoseno sebelumnya merupakan narapidana kasus korupsi penyuaipan pada 2017 silam. Walaupun sudah melaksanakan pidana penjara, Polri dikecam publik karena dari hasil sidang kode etik status AKBP Raden Brotoseno masih aktif sebagai anggota kepolisian.

Merespon kecaman Publik, Peraturan Kepolisian negara Republik





Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah resmi diundangkan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan tidak lanjut Perkap yang akan menjadi dasar Peninjauan Kembali atas putusan sidang etik AKBP Raden Brotoseno yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat tentunya kita akan menindaklanjuti, nanti secara khusus Kadiv Propam akan sampaikan," kata Jenderal Listyo Sigit di Lapangan Bhayangkara pada 19 Juni 2022 lalu. Upaya ini merupakan komitmen Polri

untuk merevisi Perpol yang dirasa kurang sesuai. Perkap yang dijanjikan oleh Kapolri ini diketahui tertuang dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 597 tahun 2022, diundangkan di Jakarta pada Rabu 15 Juni 2022 dan diteken oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

KKEP Peninjauan Kembali tertera dalam Bab IV Pasal 83 hingga 90. Dalam pasal 83, ayat 1 berbunyi 'Kapolri Berwenang melakukan Peninjauan Kembali atas putusan KKEP atau Putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat. Berikut bunyi lengkapnya:

**Bab VI
KKEP PENINJAUAN KEMBALI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 83**

(1) Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan apabila:

a. Dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan; dan/atau

b. Ditemukan alat bukti yang belum diperiksa saat Sidang KKEP atau KKEP Banding.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.

Dengan dilakukannya revisi terhadap Peraturan Kapolri ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim bahwa lembaganya mendengar aspirasi publik mengenai kasus AKBP Raden Brotoseno. Apakah akan ada sanksi? Kapolri menjawab, "terkait komitmen kami terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat kan tentunya sudah menyerukan apa yang diharapkan, dan kami tentunya ingin mewujudkan dengan melakukan mekanisme peninjauan kembali," ungkap Kapolri di Kompleks Parlemen pada 8 Juni 2022 lalu.

Menurut Kapolri, sejak kasus Brotoseno kembali mencuat, Polri terus menjajaki dan mengikuti pendapat masyarakat terkait kasus tersebut. Kapolri mengaku terus mencari upaya jalan keluar atas kasus tersebut. Hasilnya, Kapolri memutuskan untuk merevisi peraturan untuk menambahkan kewenangan peninjauan kembali bagi Kapolri. Pasalnya, aturan yang berlaku sebelum revisi Perkap, belum mengatur ketentuan mengenai hal-hal yang bisa dilakukan terhadap hasil putusan sidang etik yang dianggap mencederaikan rasa keadilan publik.

"Dengan ini kita harapkan ke depan, kita akan terus memperbaiki terhadap hal-hal yang menurut masyarakat itu mencederaikan keadilan masyarakat, dan kami komitmen dan transparan, untuk membenarkan institusi kami," jelas Kapolri.



Hari Bhayangkara,
MENDEKAT
KEPADA RAKYAT

Memasuki Hari Ulang Tahun ke 76 pada 1 Juli 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan yang hampir seluruhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan jelang HUT Bhayangkara salah satunya diisi dengan Fun Bike Semarak Bhayangkara 2022. Antusiasme para peserta terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 33.170 orang peserta.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melepas langsung peserta fun bike yang berjumlah lebih dari 30 ribu orang,

“Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyambut hari Bhayangkara 1 Juli, kita melakukan berbagai kegiatan dan hari ini kita melaksanakan fun bike semarak Bhayangkara yang diikuti kurang lebih 33.170 orang,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada 19 Juni 2022 lalu di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan.

Kegiatan fun bike ini menurut Kapolri merupakan wujud nyata upaya memelihara dan menjaga solidaritas dan sinergitas dari berbagai elemen, yakni hubungan Polri, TNI, media, OKP dan juga dengan masyarakat.

Kegiatan ini diikuti serentak di seluruh Indonesia dengan Kapolri menyapa para peserta dari berbagai daerah melalui virtual. Artinya, gegap gempita menyambut perayaan HUT Bhayangkara ke-76 tak hanya terjadi di Jakarta saja tapi serempak di seluruh Indonesia yang juga menjadi wilayah tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Tak hanya itu, Polri menyiapkan sederet lomba terbuka bagi masyarakat dalam menyambut momen Hari Bhayangkara ke-76. Diantaranya lomba musik, yang dikemas dalam tema “Festival Musik Bhayangkara”.



LAPORAN UTAMA

Festival ini bisa diikuti oleh musisi jalanan dari seluruh penjuru negeri. Puncak Festival Musik ini berakhir pada penganugerahan gelar pemenang serta pemberian hadiah di Benteng Vredereburgh Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26 Mei 2022 lalu.

Selanjutnya adalah lomba menembak yang diikuti para pemimpin redaksi media di Mako Brimob pada 11 Juni 2022 lalu. Polri juga menggelar lomba Tiga Pilar sekali, lomba foto Bhayangkara, lomba iklan masyarakat,

dan lomba film pendek bertema 'Setapak Perubahan Polri' yang puncaknya pada 22 Juni 2022 mendatang.

Selain itu juga ada lomba kesenian bertajuk 'Nusantara Gemilang' seperti tarian Nusantara, grup vokal, performing art dan unsur kreativitas lain pada 28 Juni 2022 mendatang. Puncak acara ini akan digelar di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan.

"1 Juli nanti, Polri akan mengumumkan penganugerahan Hoegeng Awards, penghargaan bagi

para Bhayangkara yang berintegritas, berdedikasi serta inovatif," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada 4 Juni 2022 lalu.

Berbicara soal tema lomba film pendek yang diselenggarakan Polri, "Setapak Perubahan Polri", tentu saja di umur ke-76 tahun ini diharapkan Kepolisian Republik Indonesia harus terus berbenah.

Kapolri juga terus berupaya keras dan sungguh-sungguh membangun kepercayaan publik bahwa Polri tidak



antikritik. Dalam kesempatan acara Festival Musik Bhayangkara dalam rangka Hari Bhayangkara ke-76 misalnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada dewan juri, kepada seluruh rekan-rekan musisi jalanan, terus tentunya kita harapkan untuk berekspresi silahkan menyampaikan hal-hal khususnya buat kami Polri untuk bisa dikritik. Sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan untuk bisa terus berbenah diri dan kaki titip kepada seluruh musisi jalanan bagaimana terus membangun

kecintaan kepada bangsa dan negara,” kata Kapolri Kamis, 26 Mei 2022 lalu.

Festival Musik Bhayangkara tahun 2022 diikuti oleh 600 lebih musisi jalanan. Dan dari ratusan musisi, terpilih 10 musisi terbaik untuk bisa menunjukkan bakatnya di malam final. Kapolri menyebut selain memeriahkan ulang tahun Polri, acara ini merupakan upaya Polri dalam membuka dan membangun ruang demokrasi, “Jika tahun lalu dalam situasi saat itu kita mencoba memberikan ruang ekspresi bagi masyarakat, bagi rekan-rekan kita

dalam membentuk kegiatan lomba mural dan lomba orasi, maka hari ini kita mengajak rekan-rekan untuk kemudian menambah musik dari bagian kegiatan yang bisa digunakan untuk menyampaikan ekspresi,”

Lebih lanjut, dalam lomba bertajuk lomba kreasi ‘Setapak Perubahan Polri’ dan lomba ‘Surat untuk Kapolri’ disambut dengan antusias masyarakat yang mendaftar menjadi peserta. Divhumas Mabes Polri mencatat setidaknya peserta kedua lomba kategori tersebut mencapai 8.194 orang. Terdiri dari 1.597 peserta lomba Setapak Perubahan Polri. Sedangkan sebanyak 6.598 orang menjadi peserta lomba Surat untuk Kapolri.

Lomba Setapak Perubahan Polri dibagi menjadi 6 kategori lomba, yakni Film Pendek, Vlog, Tiktok, Blog, Infografis, dan Fotografi.

Lomba dilakukan untuk membuka ruang-ruang kreatif digital melalui kanal-kanal positif femi memperkuat keamanan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

“Melalui Divisi Humas, Polri terus mencoba untuk menyalurkan bakat-bakat digital yang dimiliki anak bangsa melalui kanal-kanal positif sehingga membantu program pemerintah untuk menumbuhkembangkan potensi SDM Indonesia,” ungkap Kadiv Humas Polri.

Sedangkan lomba Surat Untuk Kapolri diikuti oleh siswa-siswi SD, SMP, Dan SMA. Kategori lomba ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan menulis dari peserta didik. [*]





Menguak Jejak dan Gerak

Kelompok Khilafatul Muslimin

Polisi menemukan bahwa organisasi ini menyebarkan ideologi khilafah.



Bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin yang berkibar tengah konvoi kendaraan di Brebes Jawa Tengah, Jakarta dan Bandar Lampung membuat geger jagad media sosial.

Di Brebes, para pengendara motor berkonvoi sepanjang jalan sembari mengibarkan bendera berwarna hijau di pada 29 Mei 2022. Menyusul, konvoi juga dilakukan di Kawasan Bandar Lampung, pada 1 Juni 2022 lalu.

Semakin viral karena pengendara berkonvoi membawa bendera Khilafatul Muslimin juga terjadi di Jakarta. Usut punya usut, Khilafatul

Muslimin memiliki markas di Jalan W.R Supratman, Kelurahan Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung. Peserta konvoi membawa poster bertuliskan, "Sambut kebangkitan Khilafah Islamiyyah". Tak hanya itu, mereka membagikan selebaran kepada warga di jalan. Selebaran itu berisi ajakan untuk mendirikan khilafah. Warga berinisial S mendokumentasikan aksi ini dan melaporkan kepada anggota banser di Desa Keboledan, Brebes, Jawa Tengah.

Karena dinilai semakin meresahkan, keberadaan Khilafatul Muslimin dilaporkan kepada Kepolisian.

Berdasarkan laporan tersebut, Polres Brebes melakukan serangkaian langkah hukum mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi hingga ahli. Kepolisian mendalami motif dan tujuan konvoi yang dilakukan di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Seminggu berselang, pada 6 Juni 2022, polisi mengamankan 3 orang tersangka. Mereka ditangkap atas pendalaman kasus penyebaran berita bohong dan percobaan makar yang dilakukan oleh Jamaah Khilafatul Muslimin.



“Bermula pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Desa Keboledan, Kecamatan. Wanasari, Kabupaten Brebes terdapat konvoi sepeda motor yang berjumlah kurang lebih 40 orang membagikan pamflet selebaran pada masyarakat berisi ajakan mendirikan Khilafah,” jelas Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy.

“Sebanyak 14 saksi telah dimintai keterangan, termasuk diantaranya saksi ahli bahasa, ahli agama, ahli sosiologi ahli hukum pidana. Polisi juga memeriksa saksi dari MUI, Kemenag, dan Kesbangpolinmas. Hasilnya 3 orang yang dianggap bertanggungjawab atas aksi tersebut diamankan petugas dan ditetapkan sebagai tersangka,” sambung dia.

Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, diantaranya alat peraga berupa pamflet, spanduk, baju bertuliskan Khilafatul Muslimin serta berbagai dokumen dan buku terkait khilafah. Dalam penangkapan pertama ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan pasal 107 jo Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Penindakan ini merupakan bukti sikap tegas Polri terhadap pihak yang berniat mengganti ideologi Pancasila dengan paham atau ideologi lain. Untuk kasus serupa di daerah lain saat ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian,” tutur Iqbal.

Sampai tiga konvoi ini viral, publik dibuat penasaran dengan organisasi bernama Khilafatul Muslimin ini. Pada 7 Juni 2022, Polda Metro Jaya menangkap pemimpin pusat Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Hasan Baraja. Ia langsung dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung, selanjutnya Abdul Qodir Baraja dibawa anggota Polda Metro Jaya. Penangkapan dipimpin Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Hariyadi.

Ditangkapnya pimpinan tertinggi khilafatul Muslimin tak membuat penyelidikan kasus ini berhenti. Polisi terus melakukan penyelidikan terkait siapakah penyandang dana di balik Khilafatul Muslimin. Seminggu kemudian, Kepolisian Republik



Indonesia menetapkan 23 orang menjadi tersangka atas kasus konvoi yang dilakukan oleh kelompok ini di sejumlah wilayah.

Siapa Khilafatul Muslimin?

Di markas pusatnya, terpasang papan nama bertuliskan Pusat Khilafatul Muslimin. Organisasi ini memiliki masjid bernama Kekhalifahan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa pemimpin pusat Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Hasan Baraja, merupakan mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Paham negara khalifah menjadi ajaran utama dari kelompok NII.

- Sama halnya dengan Khilafatul Muslimin, yang mengusung ideologi khilafah. Artinya, kelompok ini mempercayai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sedangkan di Indonesia, Pancasila adalah ideologi negara yang sah secara konstitusional.

- Berdiri sejak tahun 1997, Khilafatul Muslimin merupakan organisasi yang belum berbadan hukum. Saking minimnya informasi tentang organisasi ini, aparat kepolisian terus mendalami

- tentang organisasi ini. Terbaru, polisi menemukan bahwa organisasi ini menyebarkan ideologi khilafah. Tentu saja itu dilakukan secara diam-diam.

- Berdasarkan keterangan 6 orang tersangka, gerakan bawah tanah Khilafatul Muslimin tak hanya dilakukan di kawasan Lampung, tapi tersebar di puluhan satuan pendidikan berbentuk pondok pesantren di berbagai wilayah. Secara tak langsung, organisasi ini berniat mengganti ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia, dengan menyebarkan ajaran khilafah kepada pelajar.



“Kejahatan tersebut bergerak di bawah bayangan kegelapan, berada di sudut gelap sisi kehidupan yang tidak terawasi. Berbaur dalam praktik-praktik sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan kemasyarakatan yang dikenal sebagai hidden crimes atau invisible crimes” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya pada 16 Juni 2022 lalu.

Lebih lanjut, Irjen Fadil Imran menekankan bahwa kejahatan yang dilakukan Khilafatul Muslimin, yakni keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi Khilafah, masuk dalam kategori offence against the state. Karenanya, kejahatan Khilafatul Muslimin dianggap menentang legitimasi dan kedaulatan negara yang sah. “Mengancam pilar-pilar kebangsaan dan bernegara, merusak nilai, azas, dan tatanan empat pilar kebangsaan” tambahnya.

BNPT menekankan bahwa Khilafatul Muslimin akan sangat berbahaya apabila dibiarkan. Karena organisasi ini akan terus menerus menyebarkan ideologi khilafah kepada masyarakat. Organisasi ini sudah berdiri selama 27 tahun, dan selama itu pula Khilafatul Muslimin melakukan kaderisasi dan menyebarkan ideologi khilafah untuk mengganti Pancasila.

“Sudah sekian lama dia dibangun. Seperti disampaikan Kapolda, pergerakan seperti ini tidak sadar, tapi kalau dibiarkan ini sangat berbahaya.” ujar Direktur Kemampuan BNPT, Brigjen Wawan Ridwan di Mapolda Metro Jaya pada 16 Juni 2022 lalu.

BNPT menilai, apa yang dilakukan Khilafatul Muslimin serupa dengan aktivitas organisasi yang dilarang pergerakannya di Indonesia, yakni Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Islamiyah (JI). Hasil penelusuran menyebut, proses pengkaderan anggota dan pendanaan organisasi Khilafatul Muslimin dan sumber pendanaannya sama dengan NII dan JI.

Dalam kesempatan yang sama, Majelis Ulama Indonesia menyatakan kegiatan organisasi Khilafatul Muslimin yang menyebarkan ajaran Khilafah dinilai sangat merugikan umat Islam. “Khilafatul Muslimin ini adalah virus yang sangat membahayakan dan merugikan umat Islam,” ujar Ketua Bidang Dakwa MUI DKI Jakarta, Ilyas Marwal di Mapolda Metro Jaya pada 16 Juni 2022 lalu.

Secara total, Polda Metro Jaya telah menangkap 6 orang petinggi Khilafatul Muslimin dan menetapkan mereka menjadi tersangka. Diantaranya Abdul Qadir Hasan Baraja, empat orang tokoh sentral Khilafatul Muslimin berinisial AA, IN, FA, dan SW. Berikut rincian perannya:

1. AA ditangkap di Bandar Lampung atas perannya sebagai sekretaris operasional dan keuangan organisasi Khilafatul Muslimin.
2. IN ditangkap di Bandar Lampung, atas perannya sebagai penyebar doktrin melalui sistem dan pelatihan ormas Khilafatul Muslimin.

3. F ditangkap di Kota Medan, atas perannya sebagai penanggung jawaan keuangan dan pengumpul dana Khilafatul Muslimin.
4. SW ditangkap di Kota Bekasi, atas perannya sebagai pendiri Khilafatul Muslimin bersama dengan Abdul Qadir Hasan Baraja.

Paling baru, polisi menangkap menteri pendidikan Khilafatul Muslimin, Ahmad Sobirin, ia bertanggung jawab atas 30 sekolah yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Di 30 sekolah tersebut. Diketahui AS menyebarkan doktrin ideologi khilafah.





Polda Metro Jaya membeberkan nama sekolah yang dinaungi Khilafatul Muslimin, yang diketahui berfungsi sebagai kaderisasi anggota. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebut, lembaga pendidikan Khilafatul Muslimin diberi nama Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyyah.

Sekolah ini berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Polisi membongkar nama sekolah ini dan memulangkan para santrinya. Jumlah santri yang berada di Pesantren Ukhuwwan Islamiyyah ini mencapai 200 orang. Mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tak diberhentikan begitu saja, pemerintah

akan membantu melegalkan sekolah ini dan memperbaiki sistem pendidikan yang ada didalamnya.

Polisi dan pemerintah harus bergegas, karena kaderisasi yang dilakukan Khilafatul Muslimin tersebar di 25 daerah, mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat. Kombes Hengki Haryadi memastikan, 25 pondok pesantren yang berafiliasi dengan Khilafatul Muslimin ini melanggar aturan di Indonesia. Setidaknya, keberadaan lembaga pendidikan di bawah naungan Khilafatul Muslimin ini melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pesantren.

Tak hanya menangkap para petinggi organisasi Khilafatul Muslimin, Kepolisian akan terus mendalami kasus ini untuk menelusuri sumber pendanaan yang dimiliki organisasi ini. Selain itu, polisi dan pemerintah harus tetap mengawasi pelajar atau santri yang telah didoktrin oleh Khilafatul Muslimin melalui Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah. Jika dibiarkan, akan bermunculan bibit-bibit baru pelanggar ideologi Pancasila akibat dampak doktrin kekhalifahan yang mereka dapatkan semasa belajar. [*]



MEMBONGKAR DUGAAN KORUPSI

Pengadaan Lahan Rusun Cengkareng

Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya tindak pidana korupsi pengadaan lahan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat pada 2016 lalu. Bareskrim Polri mengungkap kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas pengadaan lahan seluas 4,67 hektar dan 1.137 m2.

Pembangunan rusun ini dieksekusi oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015 dan 2016. Perkara ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 649 miliar.

Kasus ini bermula pada 2016 lalu, saat Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap adanya temuan pembelian lahan sendiri yang dilakukan oleh Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun 2015.

Dalam LHP tersebut, diketahui Dinas Perumahan membeli tanah dari seorang perempuan bernama Toeti Sukarno senilai Rp. 648 miliar. Kepemilikan atas tanah tersebut berpindah menjadi milik Pemprov DKI. Kemudian, BPK



menemukan bahwa lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta ini merupakan lahan yang dimiliki oleh Pemrov DKI Jakarta, di bawah kendali Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tanah tersebut ternyata memiliki 2 sertifikat sah dari Badan Pertanahan Nasional, yakni kepemilikan perseorangan atas nama Toeti Noeziar Soekarno dan satu lagi sertifikat tanah atas nama Dinas KKP. Selain itu, Toeti Soekarno sempat mengugat Pemprov DKI Jakarta karena belum membayar uang jual beli tanah sebesar Rp. 648 miliar. Toeti Noesziar menggugat karena Pemprov DKI tak memberikan sisa pembayaran kepada dirinya sebesar Rp. 200 Miliar.

Berdasarkan kronologinya, sebidang tanah di Cengkareng ini baru dilepas oleh penduduk setempat pada tahun 1967. Kemudian di tahun 1997, lahan tersebut tercatat sebagai aset Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah. Namun pemprov DKI segera membuat sertifikat tanah.

Di tahun 2007, karena pemprov DKI tak mengantongi sertifikat, pengusaha DL Sitorus pemilik PT. Sabar Ganda menduduki dan mengklaim lahan Cengkareng tersebut. Berlanjut pada tahun 2012, terbit surat keputusan Mahkamah Agung yang isinya menolak pengajuan gugatan PT. Sabar Ganda dan memenangkan Pemprov DKI, tapi lahan tersebut tak kunjung diurus.

Berlanjut pada tahun 2014, melalui kuasa hukum Rudi Hartono Iskandar Toeti Soekarno menawarkan harga tanah tersebut kepada Pemprov DKI sebesar Rp. 17,5 juta per meter persegi. Di tahun 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menerbitkan disposisi untuk mengeksekusi tawaran dengan harga appraisal.

Dugaan Gratifikasi-Penipuan

Tepat pada 3 November 2022, Pemprov DKI Jakarta membayar tanah dan tercantum dalam akta jual beli No. 18 - No. 20 pada 5 November 2022. Baru kemudian pada 1 Juni 2016, Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap temuan dugaan gratifikasi dan penipuan pembelian lahan Cengkareng pada Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2105.

Kemudian pada 1 Juli 2016, muncul dugaan ada oknum dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta yang terlibat dalam bagi-bagi uang pembelian lahan tersebut. Di saat itu, Gubernur Ahok segera memecat Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji.

Pasalnya, Gubernur Ahok menilai pembelian lahan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta senilai Rp. 668 miliar dirasa janggal. Tanah dengan lahan seluas 4,6 hektar dibeli oleh pemilik sertifikat Toeti Soekarno. Untuk memperlancar proses pembelian fiktif tersebut, Toeti memberikan uang sebesar Rp. 9,6 miliar kepada salah seorang kepala bagian Dinas Perumahan.

Diketahui uang itu sempat ditawarkan kepada Gubernur Ahok,

namun ditolak dan Ahok justru meminta agar transaksi tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Benar saja, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, lahan tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan Pemprov DKI Jakarta.

Dari hasil pengembangan kasus, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka atas kasus ini. Yakni Sukmana selaku mantan Kepala





Bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Sedangkan Rudy Hartono Iskandar merupakan terdakwa atas kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut, "Dugaan adanya aliran penerimaan uang (kickback) dari pihak Kedua Penjual kepada oknum pejabat pengadaan dan pejabat lain terkait proses pengadaan tanah... yang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain."

"Obyek tanahnya diduga sebagian atau seluruhnya dalam kondisi bermasalah, dan atau SHM-nya diduga hasil rekayasa, sehingga tidak dapat

dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan sepenuhnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara," lanjut Brigjen Ramadhan di Bareskrim Polri pada 2 Februari 2022 lalu.

Sejumlah barang bukti diamankan terkait kasus dugaan korupsi lahan rusun Cengkareng. Beberapa diantaranya dokumen grik, dokumen persyaratan penerbitan SHM, warkah terkait tanah cengkareng, dokumen proses pengadaan tanah, dan dokumen proses pembayaran tanah. Tim penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp. 1,4 miliar dalam kasus ini.

Rinciannya uangnya adalah, dari mantan Kasie Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Cengkareng, M Shaleh sebesar Rp. 161 juta. Dan dari

mantan Camat Kecamatan Cengkareng tahun 2011-2014 Junaidi, sebesar Rp. 500 juta. Terakhir, yakni uang sebesar Rp. 790 juta dari Camat Kecamatan Cengkareng tahun 2014-2016, Mas'ud Effendi.

Sita Aset Ratusan Miliar Rupiah Tahun berselang, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp. 700 miliar terkait kasus pengadaan lahan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat. Dirditpidkor Bareskrim Polri, Brigjen Cahyono Wibowo memaparkan, "Jadi, kalau kita melihat, ini kerugian keuangan negara dari sekitar Rp. 650 miliar, tapi kita melakukan asset recovery itu sekitar Rp. 700 miliar,"

Aset yang disita polisi ini, diduga terkait dengan dua tersangka, yakni Sukmana sebagai mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, dan Rudy Hartono Iskandar sebagai pihak swasta. Polisi menemukan bahwa uang hasil dari kejahatan korupsi pengadaan tanah di Cengkareng ini berada di dalam sistem korporasi. Penyidik Bareskrim Polri terus mendalami dugaan aset para tersangka yang disembunyikan ke luar negeri.

"Kemudian untuk aset-aset yang terkait dengan bukti ada transfer ke luar negeri, kita masih mendalami juga. Tentunya nanti kita akan update

berikutnya. Karena ini menyangkut ada beberapa negara. Kita sudah lakukan upaya dengan otoritas di luar negeri dalam rangka mendalami dan pengejaran terhadap aset tersebut," ungkap Brigjen Cahyo Wibowo.

Setelah penetapan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi lahan rusun Cengkareng ini, Dit Tipikor Bareskrim Polri menjerat tersangka Rudy Hartono Iskandar dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasalnya, dalam praktiknya Rudy Hartono membuat persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik secara tidak benar.

Ditipikor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo menyebut, "Sehingga terbit SHM atas nama saudari TNS (Toeti

Sukarno). Nah, di dalam pendahuluan, pemeriksaan pendalaman kasus ini, telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa suap terhadap para pihak yang barang buktinya sudah kita sita, sehingga ini menjadi satu modus di dalam korupsi pengadaan tanah," ungkap dia di Mabes Polri pada 8 Juni 2022 lalu.

Setelah penerbitan SHM tersebut, diketahui tersangka Rudy Hartono menawarkan tanah tersebut kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Kemudian tersangka Sukmana turut serta dalam pengadaan pembangunan lahan rusun secara tidak benar. Setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 668 miliar kepada





Rudy Hartono, diketahui ia langsung melakukan penarikan beberapa kali dan dilanjutkan dengan penukaran ke mata uang asing. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli beberapa aset yang ada di Jakarta, baik berupa bangunan ataupun lainnya.

Aliran Dana ke Luar Negeri

Dari hasil pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun Cengkareng, penyidik Bareskrim Polri menemukan fakta bahwa tersangka Rudy Hartono Iskandar (RHI) melakukan tranfer uang ke luar negeri. Pendalaman aliran dana keluar negeri ini terus dilakukan guna mencari tahu keberadaan aset-aset lain yang menjadi

buah dari aksi kejahatan korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng. Bareskrim Polri bekerja sama dengan Kepolisian luar negeri, otoritas luar negeri FBI, untuk melacak aset tersebut. Dua negara yang berhasil diidentifikasi menjadi tujuan aliran dana Rudy Hartono yakni, Singapura dan Amerika Serikat.

Jika kerugian negara mencapai Rp. 649 miliar atas kasus ini, Kepolisian Republik Indonesia mampu menyelamatkan uang negara melalui penyitaan dan pemblokiran terhadap 19 aset atau properti senilai Rp. 700 miliar 970 juta.

Terbaru, penyidik masih memeriksa beberapa saksi kasus korupsi lahan

rusun Cengkareng ini. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguatkan pasal yang disangkakan kepada para tersangka, baik pusa korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kedua tersangka yang saat ini terjerat kasus tersebut, dijerat dengan pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 555 ayat 1 ke-1 Kitam Undang-Undang Hukum Pidana. Berkas perkara kasus korupsi lahan rusun Cengkareng ini akan segera dilimpahkan Tahap 1 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung.[*]

Praktik Ilegal Komplotan Penjual Solar Bersubsidi



Memang tak tahu diri kelakuan para komplotan penjual solar ini. Sudah disubsidi Pemerintah yang notabene menggunakan uang negara, tega-teganya mereka mengambil untung dengan cara haram. Praktik ilegal orang-orang tidak bertanggung jawab ini menyasar kapal-kapal nelayan dan Kapal Permata Nusantara. Para pelaku membeli solar bersubsidi kemudian dijual lagi untuk kepentingan non-subsidi dan industri.

Direktorat Tipidter Bareskrim Polri menyebut kasus penjualan solar bersubsidi ini terungkap pada 18 Mei 2022 lalu. Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut, "telah mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang terjadi sejak tahun 2021 sampai sekarang di wilayah hukum Pati," pada 24 Mei 2022.

Polisi menangkap setidaknya 12 rang tersangka yang memiliki peran

masing-masing dalam komplotan ini. Mulai dari pemilik moda hingga yang mendistribusikan BBM solar bersubsidi ini. Mereka adalah MK sebagai pemilik gudang, EAS dan JS sebagai pemodal, APP seorang kepala gudang dan AS, MT, SW, FDA, AEP, dan S yang bertindak sebagai sopir, serta MA dan TH sopir truk kapasitas 24.000 liter.

Kepolisian mengungkap modus yang dilakukan oleh pelaku. Para pelaku ini membeli bahan bakar minyak berjenis

solar bersubsidi menggunakan mobil modifikasi dari beberapa SPBU dan menyimpannya di gudang. Setelahnya, distribusi BBM solar dilakukan menggunakan truk tangki berkapasitas 24.000 liter dan 16 ribu liter.

Solar ini dikirim ke kapal-kapal nelayan dan ke Kapal Permata Nusantara. Polisi mengamankan kapal tanker Permata Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diketahui, kapal tanker ini memuat 449.000 liter solar yang diduga hasil dari penyalahgunaan yang dilakukan para tersangka.

Para tersangka ditangkap di 3 TKP yang berbeda, TKP pertama di Pati Kembang, dan dua lokasi lainnya di Puncak Wangi. Dari lokasi tersebut, kepolisian mengamankan 3 unit mobil tangki bermuatan solar. Di TKP pertama, mobil bermuatan solar subsidi sebanyak 9.000 liter. Di TKP kedua berhasil diamankan 1 unit tangki galon berisi 17.000 liter solar, dan TKP ketiga 1 unit mobil dengan muatan 100.000 liter solar. Dari penangkapan ini, kepolisian menghitung omzet yang didapatkan para pelaku mencapai Rp. 4 miliar.

Timbun Solar

Pada 24 Mei lalu, dalam gelar kasus yang dilakukan di gudang PT. Aldi Perkasa Energi, Jalan Juwana-Puncakwangi, Pati, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sejauh ini pihaknya telah mengungkap 230 kasus serupa dan menangkap 335 orang tersangka.

"Kasus terungkap pada 18 Mei 2022. Ini adalah kasus terbesar sepanjang 2022," ucap dia.

Penimbunan dilakukan di beberapa titik. Pertama di gudang di Jalan Pati-Gembong, Kelurahan Muktiharjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya lokasi kedua yakni gudang di Jalan Juwana-Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para pelaku ini bekerja secara berkelompok, mereka mengumpulkan solar bersubsidi menggunakan mobil heli yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut BBM.

Secara total, Polisi menghitung setidaknya komplotan ini telah menyelewengkan 25 ton BBM solar bersubsidi sejak 2021 lalu. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi menyebut pengungkapan kasus ini melibatkan dua perusahaan yang terseret yakni PT Rafka Pradipta dan PT Aldi Perkasa.

"Yang semuanya kita akan lakukan sidik dan kita ungkap secara tuntas sampai ke akar-akarnya untuk memberikan efek jera," ungkap Irjen Ahmad Luthfi pada 24 Mei 2022 lalu.

Dari hasil pendalaman kasus, para pelaku diketahui membeli solar bersubsidi seharga Rp.5.150,00 per liter. Solar subsidi pemerintah tersebut kemudian dijual kembali kepada pemilik gudang, dengan harga Rp. 7000,00 per liter. Oleh para pemilik gudang, solar subsidi kemudian diangkut dengan truk tangki kapasitas 24.000 liter dan 16.000 liter untuk

menjual kembali solar ke kapal-kapal nelayan senilai Rp. 10.000,- hingga Rp. 11.000,- per liter.

Tak berhenti pada penetapan 12 tersangka, dari barang bukti kapal tanker Permata Nusantara, kepolisian akan mengembangkan kasus ini untuk mencari keterkaitan dengan yang di Jakarta. Dua perusahaan penyalur solar yang terlibat, yakni PT Razka Pradipta Energi dan PT Aldi Perkasa Energi juga akan diselidiki. Sehingga pengungkapan kasus ini sampai tuntas untuk memberikan efek jera.





Di Kuningan Jabar

Belum lama berselang dari pernyataan Pertamina, kasus penyalahgunaan solar bersubsidi mulai muncul ke permukaan. Selain di Pati, pada 5 Juni 2022 lalu, Polres Kuningan Jawa barat menggerebek lokasi penimbunan solar bersubsidi di Desa Cibuntu, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Polisi mengamankan 11 ton solar bersubsidi yang sudah siap dijual ke pabrik-pabrik industri.

Pengungkapan kasus penyalahgunaan solar bersubsidi di Kuningan, bermula dari kecurigaan warga yang melihat ada aktifitas pembelian BBM dalam jumlah besar, tapi tidak pernah digunakan. Warga setempat kemudian memberikan informasi kepada Polisi dan ditemukan adanya penyalahgunaan solar bersubsidi untuk dijual kembali kepada pabrik-pabrik industri. Nilai solar yang berhasil ditimbun mencapai Rp. 77 juta, dan akan dijual dengan nilai diatas Rp. 100 juta.

Disparitas harga yang sangat tinggi membuat aksi-aksi kejahatan serupa bermunculan. Selain itu, penjualan BBM bersubsidi berpotensi tidak tepat sasaran karena belum ada aturan yang jelas. Sehingga kelangkaan BBM bersubsidi tak dapat terhindarkan.

Di sejumlah daerah sempat terjadi kelangkaan BBM Solar bersubsidi. Termasuk di Kabupaten Pati, pasca penangkapan komplotan penyalahgunaan solar subsidi, para nelayan di Kabupaten Pati sempat tak berangkat melaut. Penyebabnya solar langka dan harganya yang terus meroket.

Komplotan penyalahgunaan solar subsidi akan terus bertahan jika disparitas harga solar nonsubsidi dan subsidi masih terlampau jauh. Kasus penyalahgunaan solar subsidi di Pati akan berpotensi terjadi di wilayah lainnya. Polri bersama PT. Pertamina harus lebih gencar menyelidiki potensi kelangkaan dan potensi penimbunan BBM subsidi yang terjadi di berbagai wilayah, untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku. [*]

Para tersangka dijera Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan pasal 4- angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Tersangka kasus ini terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp. 60 miliar.

Kepolisian Republik Indonesia menekankan, tidak akan main-main dalam menindaklanjuti perintah Kapolri terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Karena subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah menyangkut kepentingan hidup orang banyak.

Solar sendiri menjadi salah satu bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Yakni dengan harga asli solar nonsubsidi sebesar Rp. 12.950,00 perliter, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp.7.800,00 perliter. Alhasil, masyarakat hanya perlu membayar

solar subsidi sebesar Rp. 5.150,00 per liternya. Padahal dalam APBN 2022, pemerintah hanya menganggarkan subsidi solar sebesar Rp. 500,00 perliternya. Pertamina kembali menutupi kekuangannya itu sebesar Rp. 7.300,00 perliternya.

Direktur utama Pertamina, Nicke Widyawati menerangkan sekarang untuk solar subsidi, nilai subsidinya lebih mahal dari harga jualnya, sehingga anggaran subsidi BBM yang dikeluarkan oleh Pertamina semakin membengkak. Artinya, aksi penyalahgunaan solar bersubsidi tentu saja melanggar hukum.

Nicke menambahkan, perbedaan harga yang besar antara solar subsidi dan non-subsidi akan menyebabkan adanya potensi penyelewengan solar subsidi ke sektro industri. Akhirnya, kelangkaan solar subsidi di beberapa daerah tak dapat terhindarkan.



ETLE,

Transformasi yang Berbuah Pundi-Pundi

Korlantas Polri Sebut Denda Tilang Elektronik Capai Rp639 Miliar

Tak hanya membuat tertib lalu-lintas sekaligus meminimalisir interaksi petugas dengan pelanggar lalu-lintas, Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik juga mengisi pundi-pundi negara dengan nilai yang fantastis.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyebut titipan denda yang terkumpul selama penerapan tilang elektronik atau ELTE jumlahnya mencapai Rp639 miliar.

Jumlah tersebut jauh melampaui titipan denda ketika tilang elektronik belum diterapkan yang hanya sebanyak 120.733 tilang dengan titipan denda sebesar Rp53,67 miliar. Sementara saat ini jumlah tilang ETLE telah mencapai sebanyak 1.771.242 dengan titipan denda Rp639 miliar.

Tilang elektronik tahap pertama di 12 Polda diberlakukan sejak 23 Maret 2021. Tilang elektronik merupakan salah

satu program 100 hari kerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui saat ini, baru 12 Polda yang menerapkan teknologi tersebut dengan menggunakan 243 kamera statis dan 10 kamera mobile.

Seperti diketahui kamera berjalan atau ETLE Mobile merupakan kamera pengawas yang menempel di seragam petugas atau di mobil dan motor polisi. Kamera tersebut akan merekam bukti



Tidak menggunakan sabuk pengaman

Pasal 289 jo pasal 106 ayat(6) pengemudi atau penumpang yg duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan.

Tata cara konfirmasi melalui website:

- Akses domain <http://www.korlantas.polri.go.id>

Code untuk melihat





pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan.

Kepala Sub Direktorat Standar Cegah dan Tindak Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri Kombes Pol Mohammad Tora menjelaskan Korlantas Polri akan terus memperluas penerapan tilang elektronik di Indonesia.

Polri tengah melakukan proses pengembangan ETLE tahap dua yang rencananya akan diterapkan di 14 Polda dengan 38 kamera statis dan dua kamera berjalan. "Sekarang sedang

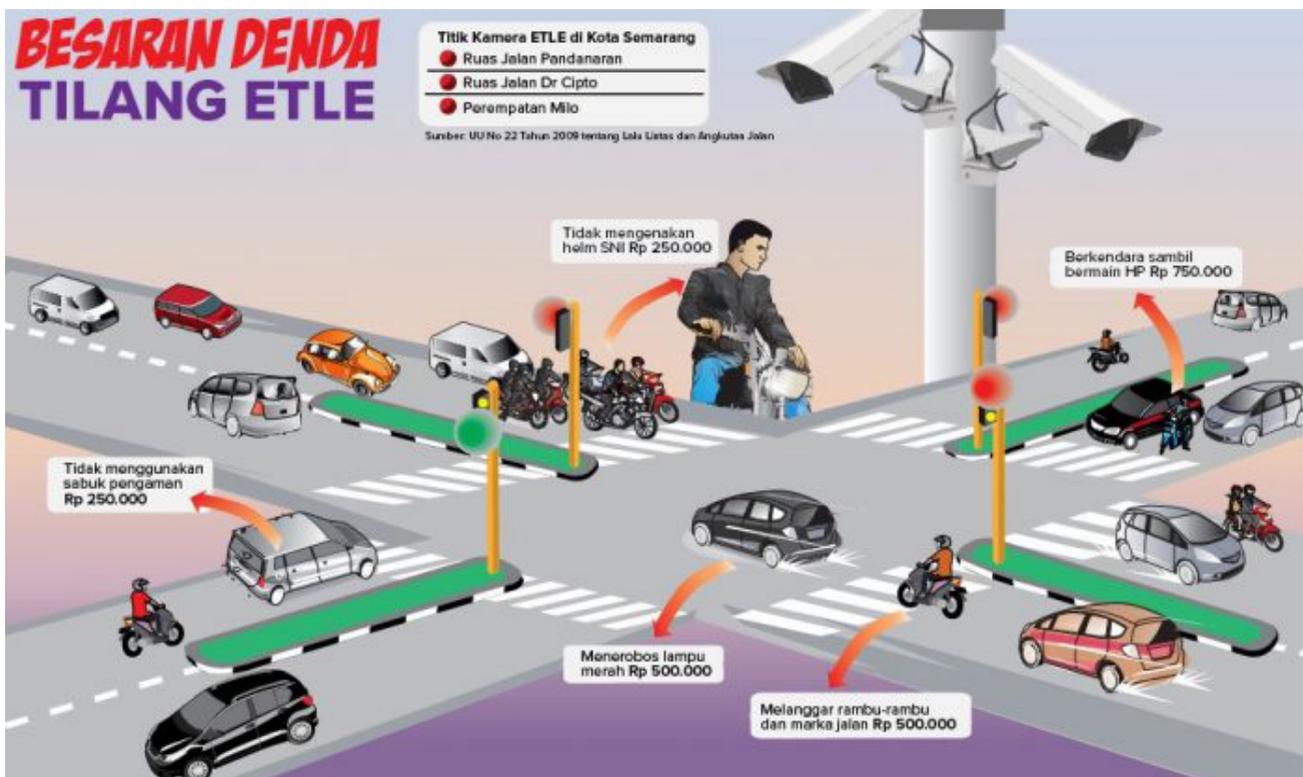
pengajuan. Tahap kedua itu nanti tahun 2023," kata Tora.

Ditambahkan lebih lanjut, tilang elektronik nantinya tidak hanya dipasang di titik-titik pelanggaran lalu lintas, tetapi juga di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan.

"Pengembangan ETLE nanti akan diarahkan, selama ini fokusnya pada titik-titik pelanggaran lalu lintas. Kita akan arahkan lagi ke titik-titik, ke tempat kecelakaan supaya ada rekamannya, seperti tanjakan di Puncak, Bogor dan lain sebagainya," kata dia.

Sementara itu, Kasubdit Penindakan Pelanggaran Subdit Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Polri Made Agus mengatakan, implementasi ETLE mobile akan berbeda di setiap wilayah. Hal ini karena disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. "Masing-masing daerah punya karakteristik masing-masing," kata Made beberapa waktu lalu.

Ia juga menjelaskan ada tiga jenis ETLE yang diterapkan Polri, yakni ETLE statis yang permanen di tempatkan di persimpangan atau titik-titik blackspot



Mekanisme Pengurusan Tilang Elektronik



(rawan kecelakaan) atau rawan pelanggaran. Kemudian ETLE portable yang bisa dipakai dalam situasi tertentu untuk kepentingan tertentu.

Sedangkan jenis terakhir yakni ETLE mobile, yang dalam penggunaannya bisa bergerak ke mana saja, berpindah ke mana saja selama menggunakan ponsel.

"Yang sudah mempunyai ETLE mobile yang berada di perangkat kendaraan roda empat mobil patroli itu di Sumatera Selatan, dan di Jawa Timur masih dilakukan riset," tuturnya.

Tak hanya ketiga jenis itu,

penerapan ETLE mobile di Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur ternyata mengakomodasi penggunaan kamera ponsel.

Di Jawa Tengah teknologi tilang elektronik ini diusung menggunakan aplikasi bernama Go-Sigap. Melalui mekanisme ini polisi yang berpatroli akan memotret pelanggar lalu lintas menggunakan handphone yang terhubung dengan aplikasi Mobile Sigap dan Go-Sigap.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat difoto menggunakan ETLE

Mobile data, aplikasi Go-Sigap antara lain pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan helm, kemudian tidak menggunakan spion, nomor polisi atau TNKB tidak sesuai dengan spekter atau tidak sesuai aturan, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran kasat mata lainnya.

Dengan adanya mekanisme tilang elektronik berbasis mobile ini, praktis polisi dan pelanggar tak perlu bertemu langsung untuk menyelesaikan tilangnya. Menurut Polda Jawa Tengah, semua dapat diselesaikan secara online.*]



Ngawangkong, Cara Polres Karawang Bangun Sinergi dengan Masyarakat

Pos Kamling Presisi dapat mengurangi terjadinya gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat dan juga untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan bangga masyarakat kepada Polri.

Mewujudkan kedekatan antara polisi dengan masyarakat, jajaran Polres Karawang menggagas gerakan 'Ngawangkong di Pos Satkamling'. Diadopsi dari bahasa Sunda, ngawangkong memiliki arti 'berbincang' atau 'ngobrol'.

Tak asal sebatas hanya ngawangkong, Polres Karawang juga mendirikan 120 pos keamanan lingkungan di sejumlah wilayah

sekaligus mewajibkan sejumlah polisi untuk ronda bareng warga.

Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengatakan, program Gerakan Ngawakong dengan membangun 120 Poskamling di beberapa wilayah Karawang dimaksudkan untuk menciptakan kondusifitas di tengah masyarakat Karawang.

Ia juga menjelaskan, ke depan

pembangunan Poskamling akan diperbanyak berdasarkan kebutuhan.

"Polres Karawang melakukan inovasi kegiatan agar lebih dekat dengan masyarakat. Sejauh ini respon masyarakat positif ya. Kita bisa ronda bareng polisi dan masyarakat," kata Aldi saat mengikuti ronda bareng warga di Poskamling Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe, Sabtu 18 Juni 2022.





Tidak hanya itu kegiatan ini juga merupakan salah satu implementasi Polri Presisi yang bertujuan menciptakan kondusifitas ditengah masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kabupaten Karawang.

Dia berharap, dengan adanya Pos Kamling Presisi dapat mengurangi terjadinya gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat dan juga untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan bangga masyarakat kepada Polri.

Aldi menambahkan, melalui

Gerakan Ngawangkong Poskamling Presisi ini, diharapkan polisi dapat menyatu dengan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas di lingkungannya masing-masing.

Ia juga berharap, kehadiran polisi dapat menambah motivasi masyarakat menjaga lingkungannya masing-masing. "Masyarakat bersama Polri ronda bareng menjaga lingkungan dapat tercipta situasi Kamtibmas yang baik di lingkungan," kata dia.

Aldi mengatakan seluruh personel polisi harus mengikuti ronda di 120

Poskamling dengan dibuat jadwal piket mulai dari mulai perwira hingga anggota.

"Nantinya kita buat jadwal piket untuk PJU, perwira dan anggota untuk hadir dalam kegiatan Pos Kamling Presisi ini, dan akan dilaksanakan secara serentak di 120 Pos Kamling Presisi yang ada di wilayah hukum Polres Karawang, dan kegiatannya dilakukan secara rutin setiap malam," kata dia.

"Insyallah dengan adanya Pos Kamling Presisi dapat disambut

POS KAMLING
DUSUN SUKATANI
RT 009 RW 004



“Insyallah dengan adanya Pos Kamling Presisi dapat disambut dan diterima dengan hangat leh warga Karawang. Kami akan gerakan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan.”

dan diterima dengan hangat leh warga Karawang. Kami akan gerakan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan.”

Aldi menyebut gerakan ‘Ngawangkong di Pos Satkamling’ merupakan ikhtiar dalam menjaga kamtibmas di lingkungan masyarakat sekaligus menjadi momen yang tepat dalam rangkaian menyambut Hari Bhayangkara ke-76.

Sementara itu, menjelang Hari Bhayangkara ke-76, Polres Karawang juga menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di antaranya khitanan massal, pelayanan vaksinasi, pengobatan massal.

Sedangkan dalam kegiatan donor darah yang sudah dilaksanakan diikuti sekitar 300 orang pendonor yang terdiri dari Personil Polres, polsek, senkom, ikatan Bela diri Karawang dan para security kawasan.

Diharapkan dengan bakti kesehatan tersebut dapat memberikan dampak meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan memberikan keberkahan bagi seluruh keluarga besar Polri agar semakin dicintai oleh masyarakat. [*]

LAWAN RENTENIA, Bhabinkamtibmas Gagas Simpan Pinjam Tanpa Bunga



Paling spesial, koperasi tidak mengenakan bunga sepeserpun atas pinjaman tersebut. Tak kurang dan tidak lebih, peminjam hanya disarankan untuk membayar sedekah.



Jamak masyarakat miskin akan terus terjerat kemiskinan karena hidup dalam ekosistem ekonomi yang mengisap. Salah satunya adalah lintah darat dan rentenir yang berkeling dari kampung ke kampung hingga pasar ke pasar yang dikenal sebagai bank plecit.

Meski masyarakat dimudahkan untuk meminjam, namun bunga yang dikenakan tak tanggung-tanggung. Sangat mencekik leher bahkan mencapai 20 persen per bulan.

Seperti di pasar-pasar lain di daerah Yogyakarta, keberadaan bank plecit di Pasar Prambanan juga tak terhindari. Banyak pedagang kecil sulit melepaskan diri dari jeratan rentenir.

Keadaan itulah yang belakangan menggugah jiwa sosial Bripta Mujadi Bhabinkamtibmas Kelurahan Bokoharjo, Polsek Prambanan, Sleman.

“Ketika saya melakukan sambang wilyah dan sambang rumah, saya mendapat banyak masukan dan keluhan dari warga yang sedang mengalami kesulitan, terutama bidang ekonomi dan prasarana,” kata Brika Mujadi.

Dari situlah ia berusaha memberikan jalan keluar. Berbagai keluhan yang didengarnya kemudian melahirkan banyak inovasi. Hal itu dilakukan dengan bersinergi bersama berbagai komunitas, lembaga dan masyarakat.

Sedangkan untuk membantu pedagang pasar dengan membentuk koperasi simpan pinjam pada tahun 2020 lalu. Paling spesial, koperasi tidak mengenakan bunga sepeserpun atas pinjaman tersebut. Tak kurang dan tidak lebih, peminjam hanya disarankan untuk membayar sedekah.

“Saya kasih pinjam Rp 500 ribu kembalinya tetap Rp 500 hanya saya sarankan untuk membayar sedekah.”

Sedekah itu, Bripka Mujadi menjelaskan digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan seperti membayarkan tagihan listrik masjid.

“Saya mempunyai inisiatif mendirikan koperasi simpan pinjam. Saya punya uang Rp 20 juta waktu itu, saya berikan kepada 40 orang. Saya niatkan sedekah, niat membantu kepada orang yang kesulitan modal,” kata Bripka Mujadi.

“Saya kasih pinjam Rp 500 ribu kembalinya tetap Rp 500 hanya saya sarankan untuk membayar sedekah.”

Total tak kurang dari 10 tagihan listrik masjid dibayarkannya dari uang

nasabah yang bersedekah di koperasi simpan pinjam itu dan dari di luar itu. Hingga kini, kegiatan sosial ini masih terus berlanjut.

Sebelum menjadi Bhabinkamtibmas, pria yang dikenal sederhana itu bertugas pada Tim Gegana Brimob Mabes Polri. Menjadi Bhabinkamtibmas adalah dorongan niatnya agar lebih dekat dengan masyarakat.

Ia mengubah cara pandang hidupnya dengan tak ingin menerima yang bukan haknya dan lebih banyak memberi ke masyarakat.

“Saya intinya menjadi Bhabinkamtibmas ingin mengubah





mindset, jadi prinsip saya begini apa yang saya berikan kepada masyarakat bukan apa yang saya dapatkan dari masyarakat,” kata dia. “Semenjak jadi Bhabin itu kalau saya bekerja inginnya membantu bukan ingin mendapatkan.”

Agar masyarakat ingat dengan Pak Bhabin, selain Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bumi Perdamaian Prambanan, Bripka Mujadi juga menggagas berbagai program program penyambungan jaringan listrik 0 (nol) rupiah, Kaleng sedekah Magrib, pembayaran biaya listrik masjid, Jumat berkah dengan sedekah beras, pemberdayaan masyarakat dengan program babon ayam, layanan ambulans hingga donor darah bersama Pak Babin.

Ia juga menginisiasi pembentukan komunitas ‘Koncone Pak Bhabin’,

pengadaan pengobatan supranatural dan termasuk membuat media informasi di channel YouTube.

Berharap citra Bhabinkamtibmas dekat dan bisa menjadi solusi permasalahan masyarakat, Bripka Mujadi menginginkan masyarakat bisa lebih dekat dengan Bhabinkamtibmas dan jika ada masalah bisa lapor ke Bhabinkamtibmas. “Jadi akan membuat orang kalau dekat dengan Pak Bhabin bisa enak, apa pun permasalahannya bisa tanya Pak Bhabin,” kata dia.

Itu mencakup soal apa saja, mulai dari perpanjangan SIM atau cara mengakses vaksin COVID-19, bisa tanya Bhabinkamtibmas.

“Kalau masyarakat punya permasalahan apa pun bisa tanya Pak Bhabin. Misalnya soal SIM, terbelit

utang, tanya Pak Bhabin. Nah itu mudah-mudahan bisa terbangun image ada apa-apa inget Pak Bhabin. Minimal Pak Bhabin tahu birokasinya,” terangnya.

Penewu Prambanan Ishadi Zayid menyebut Bripka Mujadi yang dikenal masyarakat adalah sosok yang berjiwa sosial dan pantas diteladani. Ia mencontohkan, masyarakat bhabinkamtibmas berhasil menangani Covid-19 berjalan baik, capaian vaksin memenuhi target, pengendalian cukup signifikan hasilnya.

“Evaluasi ini memelihat cermin yang sebenarnya, Mujadi tidak sedang melukis, tetapi cermin sehingga apa adanya, maka sangat layak bila Bripka Mujadi mendapatkan penghargaan,” kata dia.*]



Aiptu Komarudin,
**MENGANGKAT
CITRA UKIR SOLDER
DARI SUBANG**

Wilayah Kabupaten Subang sejak dahulu sudah dikenal sebagai salah satu pusat produksi patung ukiran. Berbagai komoditasnya seperti golok ukir, kujang hingga miniatur binatang mendunia karena kekhasnya. Termasuk ukiran yang menggunakan kayu lame sebagai bahan bakunya.

Kayu lame memiliki banyak keunggulan. Selain mempunyai tekstur permukaan yang lembut, pori-pori relatif kecil, mudah dibentuk, dan mempunyai

daya tahan yang tinggi sehingga sangat sesuai dengan cara pemberian motif untuk produk ukiran kayu.

Salah satu pengrajin di Kampung Kamarung Rt. 26 Rw. 05 Desa Pagaden, sekaligus pemilik saung kerajinan “Manggala Pamungkas” yakni Aiptu M. Komarudin yang merupakan personel Polsek Binong.

Di tengah kesibukannya sebagai personel Korps Bhayangkara, Komarudin selalu terlihat bersemangat mengenalkan golok hasil karya



inovasinya yang kemudian ia perkenalkan sebagai golok seni ukir solder khas Subang.

Dari saung kerajinannya itulah ia menghasilkan ukir golok, kujang, macan, sisingaan, golek dan masih banyak jenis miniatur sesuai jenis pesanan dari penikmat seni ukir.

Ternyata ada kisah di balik motivasi Komarudin terjun ke dunia ukir dan tergerak untuk memberdayakan pengrajin sulit meningkatkan perekonomiannya sekaligus sarana menyalurkan kecintaannya akan seni budaya ukir.

“Di daerah Pagaden ini semula satu kampung pengrajin semua, sekarang yang aktif sisa beberapa pengrajin dan selebihnya alih profesi,” kata Aiptu M. Komarudin.

Menurut pendapatnya, kurangnya komunikasi antar pengrajin dan penggiat seni adalah penyebab utama mengapa pasar seni ukir tak berkembang. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi serta perhatian dan dukungan pemerintah daerah yang minim.

“Misalkan saya mampu memasarkan karya saya hingga ke Taiwan, Inggris, Jepang itu murni karena kelincahan saya menjalin relasi dengan buyer. Sementara berpikir bagaimana nasib pengrajin lain, pelaku seni yang lain? Kan bukan hanya saya saja yang pengrajin,” kata.

Ia lantas mewujudkan idenya meningkatkan kualitas produksi golok dengan membuat hal yang berbeda dengan golok yang sebelumnya telah ada yaitu memadukan pembuatan golok dengan seni ukir.

Perbaduan itu menggabungkan hasil karya pandai besi, pembuat sarung dan pegangan golok, pengukir dan tukang solder untuk menghasilkan karya golok dengan kualitas terbaik sehingga tercipta golok seni ukir solder khas Subang.

Komarudin memberdayakan pengrajin dari berbagai wilayah yaitu pandai besi dan tukang maranggi atau pembuat sarung dan gagang golok di kampung Cikadu, Kecamatan Tanjung Siang, pengrajin ukiran di Kecamatan Pagaden dan seniman ukir solder di Kecamatan Cijambe dan Binong.

Hasilnya perpaduan itu memang luar biasa. Seni ukir solder khas Subang kini dikenal ke berbagai daerah di Indonesia pemesannya hingga ke Papua. Bahkan Komarudin mengaku seringkali menerima pesanan dari mancanegara seperti dari Australia, Malaysia, Taiwan hingga Inggris. Bahkan pelanggannya di Inggris ternyata sudah memesan beberapa kali.

Ia juga menggagas komunitas pengrajin Manggala Jati Diri yang beranggotakan belasan pengrajin dari berbagai daerah di Kabupaten Subang.

“Saya sudah ajukan ke dinas agar ada satu stand khusus souvenir untuk jual karya pengrajin-pengrajin Subang minimal galery kecil di pusat kota Subang, namun sampai hari ini belum terealisasi. Apalagi menghadapi Subang ke depan sebagai salah satu Kabupaten segitiga emas Jawa Barat, momentumnya bagus,” jelas Komarudin.

Kecintaan Komarudin terhadap seni budaya tak berhenti sampai di situ. Mengenakan ciri khas ikat kepala Sunda ia rajin mengenalkan budaya sunda dalam tugasnya sebagai Binmas





di Polsek Binong. Tak jarang ia terlihat membawa Wayang Golek sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai hal terkait kepolisian terutama kepada kalangan pelajar.

Ia kerap membawa sekitar 10 wayang golek dan tentunya batang pisang dalam setiap kunjungannya ke sekolah untuk mensosialisasikan bahaya narkoba hingga tertib berlalu lintas.

Inovasi yang dilakukannya tentunya disukai para pelajar, mereka dapat menerima informasi penting dengan antusias. Dengan cara itu, diharapkan

generasi muda Subang bisa lebih mencintai seni budaya, salah satunya Wayang Golek ini yang memang saat ini sudah semakin jarang digelar di Kabupaten Subang

Komarudin juga menginisiasi pendirian perguruan silat binaan Polsek Binong, yaitu PPS Satria Taruna Bhayangkara tahun 2016 dengan mengajak rekan kerjanya Aipda Donny Rissono yang juga memiliki keahlian Pencak Silat untuk membimbing para pelajar sekitar Polsek Binong untuk belajar Pencak Silat.

Tak tanggung-tanggung murid PPS Satria Taruna Bhayangkara bahkan pernah mencapai ribuan yang merupakan siswa dari berbagai sekolah di Kecamatan Binong dan sekitarnya.

Berbagai prestasi pencak Silat telah diraih mulai dari juara daerah, nasional hingga mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional melalui anak didiknya yang menjadi juara dalam sebuah kejuaraan tingkat Asia di Thailand.[*]



Bripka Adi, **KEPALA JAGA YANG JADI GURU NGAJI**



Setiap orang tentu saja memiliki kisahnya masing-masing. Namun, kisah inspiratif yang datang dari sosok Aipda Adi Tri Sukmoro yang kesehariannya seorang Kepala Jaga Satuan Samapta Polres Blora Polda Jawa Tengah ini patut menjadi teladan. Bertugas di kepolisian dan dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

Siapa sangka di balik kegagahannya itu ternyata menjadi sosok seorang guru mengaji di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan ia mendirikan dan sekaligus memimpin sekolah ngaji yang disebut TPQ Nurul Quran di wilayah kelurahan Bangkle RT 04 RW 05. Tak cuma mengaji dibantu oleh sang istri, Adi juga giat dakwah Islam melalui padepokannya

yang dinamakan Padepokan Alab Alab Sabrang Lor. Kegiatan mengaji di Padepokan Alab Alab Sabrang Lor dilakukan setiap hari. Setiap hari kegiatan dimulai dengan ibadah Sholat Asyar berjamaah yang digelar di Mushola dekat rumahnya dengan Adi Tri imam. Usai setelah sholat berjamaah dilanjutkan dengan sekolah mengaji



yang dilaksanakan di mushola dan tempat mengaji di rumahnya.

Adi menceritakan bahwa awal mula ia mendirikan sekolah mengaji adalah saat melihat lingkungan di sekitar tempat tinggalnya lokasinya jauh dari sekolah mengaji atau madrasah. Nah, dari situlah sedikit-sedikit ia mulai mengajari mengaji anak-anak dan remaja warga sekitar tempat tinggalnya.

• “Berawal dari itulah saya ingin
• mengamalkan ilmu yang saya dapatkan.
• Dulu hanya mengajari mengaji
• sedikit anak anak. Dan Alhamdulillah
• masyarakat sekitar sini mendukung.
• Akhirnya kita buka sekolah mengaji di
• sini,” kata Adi.

• Lebih lanjut Aipda Adi Tri
• membeberkan bahwa awal perjuangan
• mendirikan sekolah mengaji tidaklah

• mudah. Dimana selain keterbatasan
• anggaran yang menjadi masalah adalah
• keterbatasan tempat dan sarana.

• “Pada awal awal ingin mendapat
• murid banyak, namun setelah banyak
• anak anak yang ikut mengaji malah
• bingung. Tempatnya nggak ada sarana
• juga kurang Tapi Alhamdulillah istri saya
• mendukung dan ada beberapa teman
• yang ikut menjadi guru mengaji di sini,”
• lanjutnya.





Kemudian sarana dan prasarana yang ia dapatkan, Aipda Adi Tri menyampaikan bahwa ada bantuan dari para donatur seperti dari rekan rekan Polres Blora dan dari warga umum serta dermawan lainnya.

"Dengan doa dan perjuangan serta dukungan dari keluarga dan teman teman akhirnya padepokan ini bisa berkembang. Dan saat ini sudah mempunyai 90 santri," kata Adi.

Saat ini Padepokan Alab Alab Sabrang Lorsudah ada 4 kelas yang belajar mengaji di Padepokan Aipda Adi Tri. Mulai dari kelompok santri usia anak TK dan Paud, SD, hingga usia SMP dan setiap hari Jumat Khusus kelas mengaji ibu-ibu.

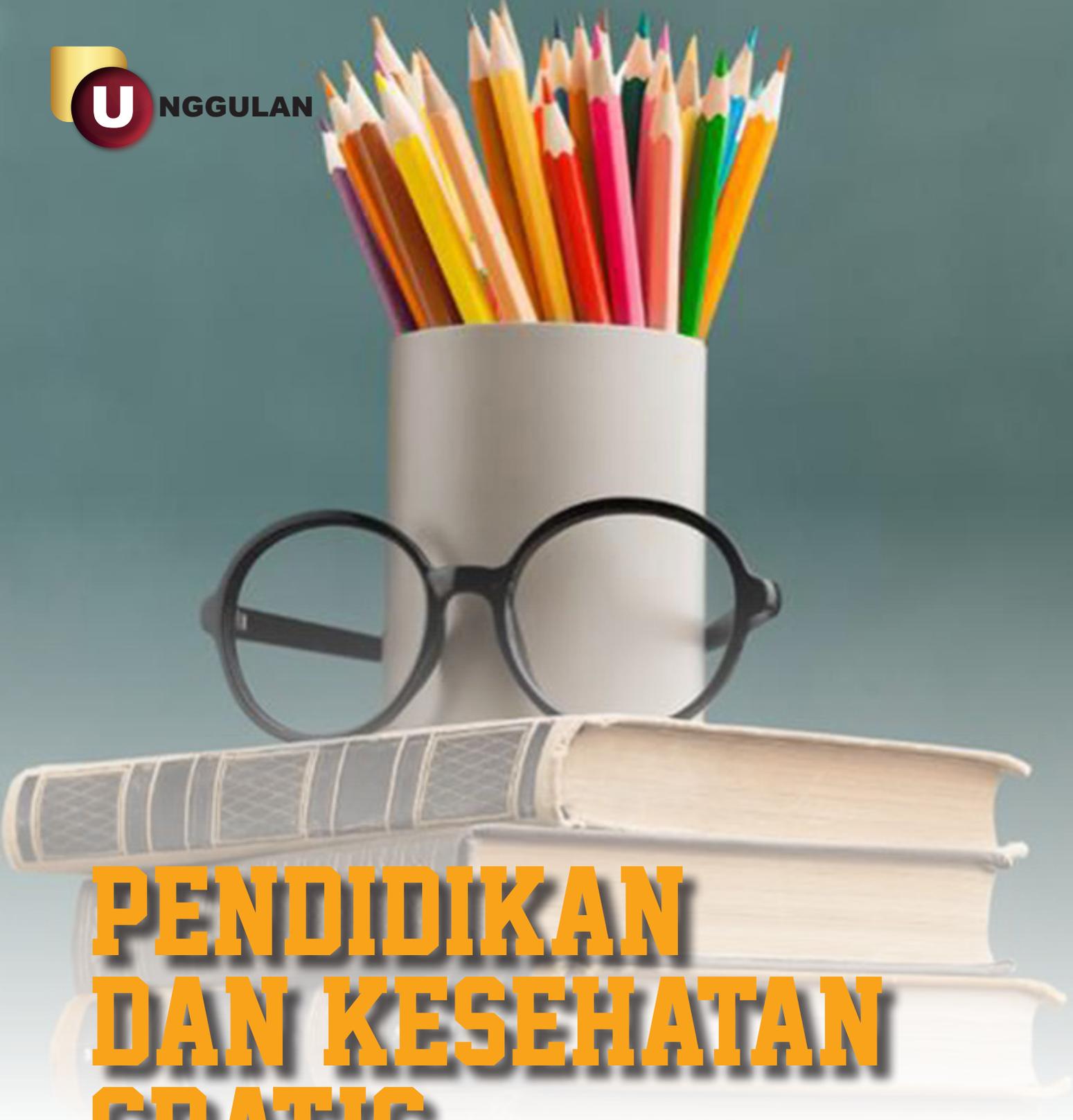
"Dengan doa dan perjuangan serta dukungan dari keluarga dan teman teman akhirnya padepokan ini bisa berkembang. Dan saat ini sudah mempunyai 90 santri," jelasnya.

Dalam kegiatan sekolah mengaji ia tidak menentukan biaya bagi para santri yang biasa dilakukan adalah pembayaran infaq sebesar 10 ribu rupiah setiap bulannya, itupun tidak diwajibkan.

"Lillahi ta'ala. Alhamdulillah atas ijin Allah kegiatan mengaji disini bisa berjalan lancar. Namun demikian tentunya kami tidak akan menolak jika ada dermawan yang ikut berdonasi untuk keperluan kegiatan mengaji disini," kata Adi Tri.

Sementara itu, secara terpisah Kasat Samapta Polres Blora AKP Kusnio,SE selaku atasan dari Aipda Adi Tri Sukmoro menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh anggotanya patut didukung.

"Yang dilakukan oleh Aipda Adi Tri sudah bagus, apalagi bisa berbagi ilmu kepada anak anak dilingkungannya. Alhamdulillah sampai saat ini ia selalu disiplin dalam melaksanakan tugas. Saat jam dinas ia bertugas dan setelah sore hari jam dinas selesai, ia menjadi guru ngaji," kata Kasat Samapta Polres Blora.



PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS

Cara Bripka Mamat Berdayakan Masyarakat



Pikiran Bripka Mamat Rahmatullah, Bhabinkamtibmas Desa Suci, Polsek Mundu Cirebon Kota terusik saat dirinya mendapati anak-anak di lingkungan tugasnya banyak yang putus sekolah.

Tak mau hanya berpangku tangan, dengan uang pribadinya dan sebagian modal pinjaman bank bintangara muda itu nekat membangun sekolah berupa pusat kegiatan belajar masyarakat. Hasilnya luar biasa, puluhan siswanya kini punya keterampilan dan lebih berdaya.

Sekolah itu bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bintang Rahmatullah dan menyediakan

pendidikan setara paket setingkat SD, SMP dan SMA.

“Jadi saya punya yayasan, namanya Yayasan Akbar Bintang Rahmatullah. Ada PKBM dan ada tempat pelatihannya juga. Dan itu saya gratiskan untuk masyarakat,” kata Mamat.

Di sekolah paket ini, setiap murid akan mendapatkan mata pelajaran layaknya seperti di sekolah-sekolah lain pada umumnya.

Dalam menjalankan program sekolah paket ini, Bripka Mamat dibantu oleh beberapa orang kerabatnya yang menjadi tenaga pengajar. Sedangkan waktu kegiatan belajar-mengajarnya hanya akan digelar selama dua hari

dalam sepekan, yakni Sabtu dan Minggu.

“Tenaga pengajarnya saudara-saudara saya ada lima orang. Saya juga kadang ikut mengajar. Kebetulan saya juga lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam,” kata dia.

Selain penyediaan paket, pusat belajar tersebut juga memberi pelatihan pembuatan mebel, pengelasan, dan perbaikan alat penyejuk ruangan (AC) yang kesemuanya tanpa dipungut biaya alias gratis. Saat ini di pusat belajar tersebut terdapat 60 siswa dengan rentang usia 15-40 tahun yang mengikuti kegiatan pembelajaran di PKBM itu.

Dalam menyediakan pelatihan kerja ini, Mamat mengaku turut dibantu oleh tenaga yang ahli di bidang masing-masing. “Kalau sudah beres pelatihannya, nanti si anak kita kasih peralatan. Setelah bisa, kita persilakan si anak untuk berdikari sendiri,” kata dia.

Mamat menuturkan semua fasilitas itu sengaja didirikan semata-mata demi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan berkeyakinan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama.

Ia percaya setiap kebaikan yang dilakukan dengan keikhlasan akan berbuah kebaikan pula bagi kehidupannya beserta keluarganya.

Selain mendirikan PKBM, ia dan

• istrinya sejak 2016 juga mendirikan
• layanan kesehatan bernama Klinik
• Pratama Rahmat.

• Klinik tersebut terletak di rumah
• mereka yang beralamat di Jalan Nyi
• Ageng Serang, Blok Bunut, Desa Sindang
• Mekar, Kecamatan Dukupuntang,
• Kabupaten Cirebon.

• Klinik kesehatan itu setiap harinya
• membantu masyarakat yang kurang
• mampu dengan menggratiskan pasien
• yang kurang mampu dan tidak punya
• keanggotaan di Badan Penyelenggara
• Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

• Sejak pertama kali dibuka sampai
• sekarang, tidak pernah klinik itu menolak
• pasien yang membutuhkan pertolongan.

• Setiap hari, pasien yang melakukan

• pengobatan di klinik tersebut sekitar 60
• orang.

• Adapun PKBM, tempat pelatihan
• kerja hingga klinik kesehatan, ia dirikan
• tidak jauh dari tempat tinggalnya di
• Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten
• Cirebon, Jawa Barat. Semua fasilitas itu
• ia sediakan untuk masyarakat kurang
• mampu tanpa ada pungutan biaya
• sepeser pun alias gratis.

• Sementara itu, untuk klinik
• kesehatan, Bripka Mamat
• mendirikannya bersama sang istri yang
• juga seorang dokter. Sama seperti
• PKBM dan Pelatihan Kerja, Klinik milik
• Bripka Mamat juga tidak jarang memberi
• pelayanan kesehatan secara gratis
• kepada masyarakat kurang mampu.





“Kalaupun orang itu tidak mampu, ya kita gratiskan. Tapi ndilalah-nya, Alhamdulillah, setiap kali ada orang nggak mampu terus kita gratiskan, kadang timbal baliknya, ketika dia sudah sembuh dia datang lagi ke rumah bawa pisang atau bawa boled,” kata Bripka Mamat.

“Jadi ya gitulah, yang penting mah orang hidup bisa bermanfaat untuk orang lain. Pasti kita juga dikasih pertolongan oleh Allah,” kata dia.

Ke depan, Bripka Mamat juga berencana membangun sebuah Pondok

• Pesantren dan Sekolah Dasar Islam
 • Terpadu (SDIT) yang diperuntukkan bagi
 • anak-anak dari keluarga kurang mampu.
 • Kapolres Cirebon Kota, AKBP M
 • Fahri Siregar, mengapresiasi Bripka
 • Mamat Rahmatullah yang mendirikan
 • Yayasan Akbar Bintang Rahmatullah.
 • Menurut dia, apa yang dilakukan
 • Bripka Mamat dan istrinya, merupakan
 • inspirasi bagi seluruh anggota
 • Polri, khususnya di Polres Cirebon
 • Kota. “ Bripka Mamat dan istrinya
 • yang merupakan Bhayangkari telah
 • berkontribusi untuk masyarakat sekitar

• tempat tinggalnya,” kata M Fahri Siregar.
 • Lebih lanjut ia menambahkan,
 • pihaknya mengaku sangat bangga
 • terhadap Bripka Mamat yang telah
 • berkontribusi nyata bagi masyarakat
 • melalui berbagai pelayanan gratis di
 • yayasannya.
 • “Secara kedinasan rutin Bripka
 • Mamat juga termasuk anggota yang
 • baik danbertindak aktif sebagai
 • Bhabinkamtibmas Desa Suci,
 • Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon,”
 • kata Fahri Siregar.[*]

A police officer in a grey uniform and black beret with gold insignia is speaking at a podium. He is gesturing with his right hand, pointing upwards. The background is a blurred banner with the year '2022' and other text. The overall scene is a formal event.

B

UNGA RAMPAI

Rakernis Baharkam Polri
**EVALUASI
PENANGANAN
PANDEMI**

Penanganan pandemi Covid-19 menjadi salah satu agenda penting dalam Rakernis tahun 2022 Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang digelar di Bali, Kamis 16 Juni 2022.

Kepala Baharkam Polri, Komjen Arief Sulistyanto mengatakan selama dua tahun belakangan ini, Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19. Tentunya sangat berdampak bagi seluruh elemen masyarakat. Polri kata Arief menjadi tulang punggung utama dalam penanganan pandemi tersebut.

"Mulai dari kegiatan sosialisasi protokol kesehatan, pengawasan PPKM, pendistribusian bantuan tunai dari pemerintah, hingga vaksinasi," kata Jenderal bintang tiga ini.

Acara yang berlangsung mulai 15 Juni 2022 sampai dengan 17 Juni 2022 yang diikuti oleh seluruh jajaran Baharkam Polri itu bertema "Mengefektifkan Tugas Pemeliharaan Kamtibmas Dalam Program Polri Presisi Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Dengan Mewujudkan Kamtibmas Yang Kondusif Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural Menuju Indonesia Maju"

Mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa Rakernis ini bertujuan mengevaluasi dan menyamakan persepsi langkah ke depan untuk memberikan pengabdian terbaik di jajaran Baharkam Polri.

"Perlu pengelolaan masalah dengan benar dan tepat dalam menghadapi kondisi terkini di masyarakat yang begitu kompleks dan dinamis termasuk Covid-19 yang sangat berdampak bagi seluruh elemen masyarakat," tambahnya.

Selain soal penanganan pandemi, Baharkam Polri juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan preemtif berupa imbauan. preventif berupa pencegahan dan represif berupa penegakkan hukum.

"Dalam pengelolaan potensi gangguan saat pengambilan keputusan, kita memerlukan ketegasan agar tidak berdampak kepada pelaksana tugas kita dan tidak berkembang menjadi ambang gangguan," kata Kabaharkam mengingatkan.

Ke depan yang dibutuhkan adalah polisi yang mampu mengelola masalah yang terjadi di masyarakat dan polisi yang proaktif.

Sementara Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Indra Miza selaku ketua panitia Rakernis menyampaikan bahwa evaluasi ini selanjutnya akan digunakan untuk merumuskan strategi dan konsep operasional pemeliharaan keamanan di seluruh Indonesia secara lebih tepat dan kontekstual.

Kakorpolairud juga menjelaskan bahwa acara Rakernis ini diikuti oleh 169 peserta yang terdiri dari PJU Baharkam Polri, Kakor Jajaran Baharkam Polri, Direktur Jajaran Baharkam Polri dan Direktur Polda di jajaran Baharkam Polri serta para Kapusdik jajaran Baharkam Polri.

Acara dilanjutkan dengan paparan yang dilakukan oleh para Kakor Jajaran Baharkam Polri, Kapolda Bali dan perwakilan Direktur Jajaran Baharkam Polri serta Direktur Polda jajaran Baharkam Polri. [*]



KAPOLRI: SINERGITAS DAN SOLIDITAS KUNCI MENUJU INDONESIA EMAS



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggandeng 51 organisasi kemasyarakatan pemuda dan mahasiswa serta buruh dalam pelaksanaan puncak Hari Bakti Kesehatan dalam rangkaian menyambut Hari Bhayangkara ke-76 Bhayangkara di Titik Nol Kilometer, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Dalam rangkaian semarak Hari Bhayangkara ke-76, Polri menggandeng seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seperti lomba yang sudah dilaksanakan seperti Festival Musik Bhayangkara yang diikuti oleh para komunitas pengamen jalanan (KPJ) di Benteng Vrederburgh, Yogyakarta pada 26 Mei 2022 kemarin.

Selain itu juga lomba menembak bersama insan media dan lomba-lomba lainnya yang tengah dilaksanakan seperti lomba kreasi membuat film pendek, infografis, vlog, tiktok, blog dan fotografi serta juga lomba menulis Surat Untuk Kapolri.

Tema yang diambil pada Road to 76 ini adalah "Polri Yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh".

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini senang dalam kegiatan Hari Bakti Kesehatan yang dilaksanakan serentak di 34 Provinsi di Indonesia, Polri mendapatkan rekor MURI dalam pelaksanaan operasi celah bibir dan

lelangit dengan jumlah pasien 918 orang.

Selain itu masyarakat juga antusias mengikuti kegiatan vaksinasi yang menargetkan 1 juta dosis untuk booster dan pelayanan kesehatan lainnya seperti donor darah dan operasi katarak.

Jenderal bintang empat ini berterima kasih kepada para tenaga kesehatan dari pelbagai instansi yang dibantu oleh teman-teman dari OKP, organisasi mahasiswa dan juga buruh.

"Ini merupakan perwujudan dari sinergitas dan soliditas dari kita semua untuk masyarakat. Khususnya yang saat ini membutuhkan perbaikan-perbaikan kesehatan," ucapnya.

la pun optimistis dengan adanya



sinergitas dan soliditas antar-elemen bangsa dan berharap Indonesia akan lebih jauh kedepannya. Sehingga visi menuju Indonesia di tahun 2045 bisa terwujud.

“Sekali lagi, tentunya semangat ini terus kita gelorakan di Titik Nol ini. Kita memandang jauh kedepan bahwa Indonesia jauh menjadi lebih baik, untuk bisa mencapai visi kita untuk menuju Indonesia Emas di Tahun 2045,” tandasnya.

Pada kesempatan kegiatan ini, Kapolri juga menyaksikan penandatanganan komitmen bersama elemen bangsa yakni pemuda, mahasiswa dan buruh untuk sama-

sama mengawal dan menuntaskan pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur.

“Hari ini hampir seluruh elemen bangsa, dari organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan juga sebagian besar serikat pekerja atau buruh juga ikut hadir tentunya menjadi komitmen kita. Bahwa dengan adanya komitmen penandatanganan ini, sebagai wujud dukungan untuk keberlanjutan dari IKN,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Penandatanganan bersama elemen bangsa itu, kata Sigit, merupakan komitmen dari generasi penerus bangsa agar melanjutkan semangat dan cita-cita dari pembangunan IKN ini.

“Pembangunan ini tentunya berjalan dengan waktu yang panjang, kita disini, Kapolri, Pangdam, Kapolda, PJU, tentunya mengawal kebijakan ini. Dan selanjutnya rekan-rekan generasi muda inilah yang tentu melanjutkan dan mengawal sampai tuntas,” kata dia.

“Karena mungkin saja nanti diantaranya rekan-rekan kita akan menjadi pemimpin nasional di tahun 2045. Jadi tanggung jawab untuk melanjutkan kita titipkan kepada seluruh rekan-rekan semua.”

KAPOLRI AJAK MASYARAKAT AMANKAN AGENDA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Penguatan sinergitas dan soliditas terus dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada Minggu pagi 19 Juni 2022, orang nomor satu di Polri ini melakukan goes bareng dalam acara Fun Bike di Mabes Polri, Jakarta.

Bersama TNI dan masyarakat, Listyo mengayuh sepedanya menuju Bundaran Hotel Indonesia dan kembali ke Mabes Polri.

Kegiatan Fun Bike dalam rangkaian memperingati Hari Bhayangkara ke-76 diikuti oleh 33.170 peserta dari TNI-Polri, insan media, komunitas sepeda, OKP dan warga lainnya.



la menekankan agar seluruh elemen masyarakat dapat bersatu padu untuk sama-sama menyukseskan seluruh perhelatan agenda nasional maupun internasional, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Salah satunya, ujar Sigit yaitu agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tahapannya saat ini mulai berjalan. Dengan penguatan sinergitas dan soliditas, menurut Kapolri hal itu merupakan kunci untuk meastikan seluruh agenda dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

“Kita juga akan menghadapi berbagai agenda internasional. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Presidensi G20 dan itu semua juga membutuhkan sinergitas dan soliditas,” ujar Kapolri.

Sementara mengenai kegiatan Fun Bike ini, ia juga berharap dapat meningkatkan minat masyarakat bersepeda. Pasalnya, hobi gowes sepeda juga memiliki Multiplier Effect, selain meningkatkan stamina juga mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

“Mulai dari bagaimana bersepeda akan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, alternatif transportasi dan harapan kita dapat timbulkan UMKM-UMKM industri terkait dengan hal yang bisa membuka lapangan pekerjaan,” tandasnya.

Dirinya berharap Korps Bhayangkara terus meningkatkan sinergitas dan soliditas dengan elemen lainnya. Sehingga tugas pokok kepolisian dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dapat berjalan optimal. “Melaksanakan transformasi Polri yang presisi dan tentunya Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat,” pungkas Kapolri.



Gawe Rapah,

Kapolda NTB Ajak Masyarakat Ciptakan Harkamtibmas

Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Djoko Poerwanto menyaksikan pembacaan Ikrar Sopoq Tundun atau satu keturuan dalam acara “Gawe Rapah” di Desa Mareje, Lembar, Lombok Barat, Rabu 18 Mei 2022.

Jenderal bintang dua itu berharap kegiatan ini dapat memperat tali silaturahmi dan juga sebagai simbol bersatunya kembali masyarakat dalam kerukunan dan keberagaman.

Mengusung tema “Kita Semua Bersaudara, Damai Bumi Marejeku” tersebut, Kapolda NTB mengungkapkan

dukungan dan apresiasi kepolisian atas momen kebersamaan menjaga kerukunan dalam keberagaman.

“Ini sangat luar biasa. Kami tentunya dari pihak Kepolisian, dengan tugas fungsi sangat mendukung dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, yang semuanya bermuara pada satu tujuan yakni memelihara keragaman dan menjaga situasi yang kondusif,” kata Kapolda NTB.

Mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim ini berujar, pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Polri semata. Tetapi tugas harkamtibmas merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat.

“Polri tidak akan pernah mampu dengan sukses dalam menjalankan tugas dan fungsi kalau tidak didukung oleh masyarakat dan elemen yang ada. Karena itu, mari kita bersama-sama, bahu membahu menjaga situasi kamtibmas di Provinsi NTB yang kondusif, itu bisa menjadi lebih baik, sehingga kemanfaatannya benar-benar





bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.

Sementara Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa tantangan ke depan semakin tidak mudah karena pengaruh sosial media. Karena itu Zulkieflimansyah mengajak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk dapat mengeliminir setiap permasalahan dengan duduk santai bersama.

“Kami di Forkopimda NTB memiliki pertemuan santai untuk membicarakan hal-hal penting. Kami berharap agar inisiasi untuk adanya pertemuan

santai sambil ngopi dapat dilakukan di Kabupaten juga, karena efektif dalam menyelesaikan masalah,” kata Gubernur NTB.

Dalam kesempatan itu Gubernur NTB juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Kapolda NTB dan pihak-pihak terkait, yang dengan sigap dan cekatan dalam mengatensi setiap permasalahan yang muncul terutama dalam menjaga Mareje tetap aman dan damai.

“Apresiasi kami untuk Kapolda, Danrem serta kita semua. Beruntung juga kita memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang luar biasa. Terima kasih

kepada semua pihak dan mari kita jaga desa kita tercinta agar tetap damai dan rukun,” ujarnya.

Tampak hadir dalam Gawe Rapa di Desa Mareje tersebut, Danrem 162/Wira Bhakti, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Lombok Barat, Ketua Pengurus Daerah Permadubudhi NTB dan Pengurus Majelis Adat Sasak (MAS) serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat Islam dan Budha.[*]

Polda Papua Barat Salurkan 1.000 Paket Sembako



Menyambut Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-78, Polda Papua Barat Polda Papua Barat menggelar berbagai kegiatan termasuk bakti sosial. Kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tornagogo Sihombing menjelaskan kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Polda di Indonesia, dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara.

Selain melakukan bakti sosial, Polda Papua Barat juga membagikan sejumlah bantuan berupa sembako.

“Dengan kondisi kesehatan yang mantap, akan menumbuhkan jiwa yang kuat dan semangat yang tinggi untuk bekerja, sehingga pemulihan ekonomi nasional akan semakin dekat dengan visi Indonesia maju,” kata Kapolda.

Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Adam Erwinda lebih lanjut menjelaskan kegiatan bansos serentak tersebut dilepas oleh Kapolda Papua Barat.

“Kegiatan bansos dan bansos serentak tersebut dipimpin langsung oleh kapolda, dengan menyerahkan secara simbolis 3 buah helm dan 3 paket bansos kepada mahasiswa dan tokoh masyarakat,”

“Kegiatan bansos dan bansos serentak tersebut dipimpin langsung oleh kapolda, dengan menyerahkan secara simbolis 3 buah helm dan 3 paket bansos kepada mahasiswa dan tokoh masyarakat,” kata Adam.

“Selanjutnya rombongan kendaraan bansos yang diawaki oleh personel Ditlantas Polda Papua Barat dan tukang ojek dilepas oleh Kapolda Papua Barat didampingi Pejabat Utama Polda Papua Barat.”

Setelah kegiatan pelepasan bansos tersebut dilanjutkan dengan video konferensi bersama Kapolri. Sebagai giat bansos religi serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Bakti religi yang akan dilaksanakan oleh personel Polda Papua Barat dengan melaksanakan kerja bakti di berbagai tempat ibadah sedangkan bantuan sosial akan diserahkan kepada para yatim piatu, fakir miskin, buruh, purnawirawan Polri, tenaga medis, UMKM terdampak pandemi.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada tokoh agama, anak yatim piatu di panti asuhan, penyandang disabilitas, mama papua penjual tradisional, mahasiswa, dan tukang ojek.

“Ada sekitar 1.000 paket sembako yang akan kita salurkan. Bantuan ini akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima bantuan tersebut,” kata Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Pol Raydian Kokrosono.

Dijelaskan Raydian, kegiatan bantuan sosial religi oleh Ditlantas Polda Papua Barat beserta jajaran Sat Lintas Polres berlokasi di 44 tempat ibadah. Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 76 tepat pada 1 Juli 2022 mendatang.

“Akan didistribusikan 1.000 paket Bansos itu. Ini salah bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat di Papua Barat,” kata dia.

Diharapkan dengan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Ini salah bentuk kepedulian Polri khusus Ditlantas Polda Papua Barat.[*]





HUT BHAYANGKARA KE-76, Polre Malang Bedah Rumah Warga

Memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Bhayangkara, jajaran Polres Malang menyerahkan kunci rumah milik seorang nenek bernama Rupini yang tuntas direhab. Penyerahan kunci tersebut dilakukan secara langsung oleh Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat.

Dijelaskan lebih lanjut, kegiatan bakti sosial religi sejatinya merupakan bentuk kepedulian dari Polri dan TNI maupun unsur pemerintah daerah untuk berbagi. Terutama kepada warga di Kabupaten Malang yang membutuhkan.

"Lebih khusus lagi kepada warga-warga kita yang selama hampir dua tahun terakhir ini terdampak akibat pandemi Covid-19," kata Ferli di



Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Senin, 20 Juni 2022.

"Ini kita laksanakan kepada warga kita yaitu Ibu Rupini, beralamatkan di Dusun Patuk Sukolilo, RT 30, RW 12, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang."

Ferli berharap bantuan tersebut bisa memberikan manfaat bagi Rupini dan keluarga.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam melakukan bedah rumah, Polres Malang maupun Polsek Wajak tidak sendirian namun dibantu berbagai pihak yang peduli terhadap kegiatan sosial tersebut.

Dalam hal ini, Muspika Kecamatan Wajak yang telah membantu memfasilitasi kegiatan serta seluruh warga masyarakat bahu membahu membedah rumah Nenek Rupini.

"Apresiasi juga saya berikan kepada rekan-rekan Babinsa yang mau turut membantu menyemarakkan kegiatan bakti sosial religi. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kita," kata Ferli.

"Kegiatan bakti sosial religi ini sejatinya merupakan bentuk kepedulian dari Polri, rekan-rekan TNI maupun unsur Pemerintah Daerah untuk bisa

berbagi utamanya kepada warga-warga kita yang membutuhkan."

Usai bakti sosial religi Polres Malang dan penyerahan kunci bedah rumah jajaran Polres Malang juga membagikan 160 paket sembako. Bantuan tersebut akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. (*)



Polres Sanggau Peringati **HUT BHAYANGKARA KE-76** **GELAR BANSOS DI PERBATASAN**

Polres Sanggau menggandeng Bhayangkara Jeep Sanggau (BJS) menggelar acara bakti sosial dalam Frontier Overland 4x4 Sanggau di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Kegiatan di Dusun Gun Tembawang dan Dusun Badat Lama, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-76 yang dilaksanakan dari tanggal 18 sampai 19 Juni 2022.

Rombongan Frontier Overland 4x4 Sanggau dan Bansos dipimpin Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan dan diikuti antara lain oleh Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Bayu Yudha Pratama, Dansatgas Pamtas Yonif 645/GTY Letkol Inf Hudallah dan beberapa pejabat lain.

Berangkat dari Polsek Entikong menuju Dusun Badat Lama, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong rombongan tiba di Pos Satgas Pamtas

Ri-Malaysia Yonif 645/Gty Dusun Gun Tembawang.

Kegiatan dilanjutkan kegiatan penyerahan bantuan dari Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan kepada Danpos Pamtas Gun Tembawang, Letda inf JA Sinaga.

Melanjutkan perjalanan, rombongan lantas menuju Dusun Badat Lama, Desa Suruh Tembawang dan disambut masyarakat Dusun Badat Lama. Dalam kesempatan tersebut

diserahkan Bansos dari Kapolres Sanggau Dan Dandim 1204/Sanggau kepada masyarakat dan pelajar Dusun Badat Lama dan Baru.

Dalam kesempatan itu, Kepala Wilayah Badat Lama Gretdy mengatakan bahwa suatu kehormatan warga Dusun Badat lama bisa dikunjungi oleh Kapolres, Dandim Sanggau beserta rombongan.

"Harapan kami dari masyarakat Dusun Badat lama bahwa banyaknya generasi muda bercita-cita ingin menjadi abdi Negara melalui TNI-POLRI, kiranya dapat dibantu, sehingga ada

kebanggaan bagi kami bila anak-anak kami ada yang mewakili untuk menjadi anggota TNI-Polri," kata dia.

la menambahkan sampai saat ini belum ada pemuda/pemudi dari Dusun Badat Lama yang menjadi anggota Polri. "Sudah beberapa kali Anak-anak kami yang mencoba mendaftar TNI-POLRI, namun tidak satupun yang lulus dalam seleksi tersebut," kata dia menjelaskan.

Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-76. Ia juga menyampaikan terima kasih atas

"Dalam penerimaan Polri sifatnya transparan dan tidak ada pungli/ bayar untuk masuk menjadi Polri,"

sambutan dari masyarakat Dusun Badat Lama dan Baru.

"Terkait dengan rekrutmen TNI-POLRI, agar masyarakat Dusun Badat Lama dan Badat Baru, benar-benar mempersiapkan putra dan putri nya jauh hari sebelum mendaftar terutama masalah kesehatan dan fisik/jasmani," kata dia.

Ia menambahkan, Polres Sanggau dan Polsek sifatnya mendata dan merekrut serta melatih peserta yang mendaftar, sedangkan terkait kelulusan merupakan kewenangan panitia tingkat Polda sesuai dari hasil tes yang dijalani peserta.

"Dalam penerimaan Polri sifatnya transparan dan tidak ada pungli/bayar untuk masuk menjadi Polri," kata dia menegaskan.

Setelah kegiatan Bansos di Dusun Badat lama selesai, Pada pukul 18.50 Wib, rombongan kembali menuju Pos Pamtas Gun Tembawang untuk beristirahat dan bermalam di Pos Satgas Pantas.

Kegiatan berlanjut hari berikutnya dengan perjalanan menuju Dusun Gun Tembawang untuk memberikan Bansos kepada warga Dusun Gun Tembawang yang secara simbolis diterima Kadus Gun Tembawang, Gatot dan masyarakat dusun Gun Tembawang.

Setelah penyerahan Bansos selesai selanjutnya rombongan menuju patok titik Nol Perbatasan RI-Malaysia di titik kide F 147 yang terletak di Dusun Gun Tembawang. Dusun ini berbatasan langsung dengan kampung Sapit (Malaysia).

Rangkaian kegiatan Frontier Overland 4x4 Sanggau dan Bansos dalam rangka Hari Bhayangkara Ke-76 di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong berjalan lancar, aman dan kondusif. [*]





Jadi Penumpang Dadakan, **Cara Polisi** Bantu Pengendara Mobil di Jembatan Curug

Jembatan Curug atau Jembatan Antelope di Bekasi terdampak pengerjaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pemasangan grinder pada proyek tersebut membuat jembatan Curug hanya menyisakan ketinggian 170 cm dari.

Kondisi itu tentu membuat Jembatan Curug hanya bisa dilintasi kendaraan secara terbatas.

Ada cerita menarik tentang jembatan itu yang kisahnya kemudian viral di media sosial. Honda Freed yang mestinya memiliki tinggi normal 171

ternyata bisa lolos melewati jembatan. Bagaimana ceritanya?

Pemilik akun tiktok @abbazaydaan yang merupakan pemilik kendaraan Honda Freed itu mengunggah pengalamannya saat berhasil melintasi jembatan. Dalam unggahannya itu ia menulis, "Pengalaman naik freed menerobos pemasangan girder kereta cepat di jembatan curug. 14 Juni 2022, 13.51 WIB."

Jadi ceritanya Honda Freed itu hendak melintasi Jembatan Curug, Kamis, 14 Juni 2022 silam.

Awalnya sih aman-aman saja, namun kemudian diberhentikan polisi yang berjaga.

Tidak hanya diberhentikan, polisi meminta pengemudi Honda Freed untuk mundur karena mobilnya jelas-jelas tak bakalan muat dan mentok bagian atasnya.

"Kena Pak," kata polisi-polisi berseragam itu sambil menyetop mobil Honda Freed yang akan melintas. Kemudian salah satu petugas memberitahukan kalau Honda Freed, hanya bisa lolos melintasi Jembatan



“Nggak tau kenapa liat video ini AYEMM.. liat polisi sm masyarakat saling membantu,” dan “semangat pak polisi dan semua petugas semoga cepet ketemu solusi baiknya.”

Curug kalau pakai trik tertentu karena bagian belakang kendaraan dipastikan bakal nyangkut. “Ini solusinya harus dinaikin,” kata dia lagi.

Bukan tanpa alasan saran itu, sebelumnya mobil sejenis memang benar-benar nyangkut. “Tadi ada Freed yang nyangkut soalnya, kita naikin rame-rame biar bisa lewat,” paparnya.

“Jadi kita turun?” kata si pengemudi Honda Freed itu bingung. “Bukan, mobilnya dinaikin orang,” kata polisi-polisi itu. “Kurang banyak nih orangnya.”

Ternyata yang dimaksud dengan ‘dinaikin’ oleh para polisi itu mobil diberi muatan tambahan yang otomatis membuat mobil menjadi lebih rendah. Dan bukan dinaikin atau diangkat melintasi proyek grinder.

“Oh dinaikin...” kata si pengemudi yang rupanya sudah mulai paham maksudnya. Akhirnya beberapa polisi secara sukarela menjadi penumpang dadakan di mobil itu.

“Nah itu gendut sini-sini,” kata polisi itu sambil menunjuk sesama rekan polisi. “Maaf ya pak,” kata si pengemudi itu merasa telah merepotkan para polisi.

Akhirnya, tiga orang polisi -dipilih yang paling ‘berat’- masuk ke mobil dan berdesakan-desakan di bangku tengah. Dan benar saja, ketika pelan-pelan mobil itu beringsut ke kolong grinder, bagian atas mobil tak lagi mentok. Aman.

“Bagaimana pak seru nggak,” tanya penumpang mobil itu menggoda para polisi yang duduk di dalam mobil. Tentu saja godaan itu diambut dengan senyum dan tawa berderai.

“Terus...terus, jauh masih sisa satu jari,” kata polisi itu menjelaskan jarak atap mobil dan bagian bawah grinder proyek.

pengalaman naik
Freed menerobos
pemasangan girder
Kereta Cepat di
Jembatan Curug.

14 Juni 2022

13.51wib



“Alhamdulillah...Barakallah,” ucap pengemudi dan penumpang mobil begitu kendaraan berhasil melintasi kolong. “Saya makasih banyak pak sudah dibantu,” kata pengemudi mobil tulus yang dijawab dengan derai tawa saat ketiga polisi itu turun dari mobil. “Terima kasih banyak pak,” kata dia sekali lagi.

“Saya pikir ngapain harus dinaikin,” kata si pengemudi dalam unggahan itu. “Kirain mau diangkat mobilnya,” timpal si penumpang.

Ketika pengalaman itu diunggah di tiktok, video itu viral dan sudah ditonton setidaknya oleh 1,7 juta orang dan menuai beragam komentar positif. “Hahaha perwira luh itu ,jadi lucu kaya anak sekolah lgi study tour,” tulis akun @Alazka di kolom komentar. Sementara itu, pengguna lain menambahkan komentara, “nggak tau kenapa liat video ini AYEMM.. liat polisi sm masyarakat saling membantu,” dan “semangat pak polisi dan semua petugas semoga cepet ketemu solusi baiknya.”



POLISI ADALAH KITA



**DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
PATUH DALAM BERKENDARA
SELAMATKAN JIWA ANAK BANGSA**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



INOVASI DIVHUMAS BIRO PENMAS POLRI MAJALAH TRIBRATA NEWS TERSEDIA ONLINE



www.humas.polri.go.id